

ISEI LEAD INDICATOR



REJEKI KUMPUL DAPUR NGEBUL



PUBLISHER
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Office of Chief Economist

PENERBIT

Bidang Akademik dan Riset
ISEI

Ketua Bidang

Hermanto Siregar

Senior Economist

Sektor Riil = Bayu Krisnamurthi
International Trade = Sahara
Keuangan = Josua Pardede

Sekretaris Eksekutif

Firman Sihol Parningotan

Tim Peneliti

Jonathan Ersten Herawan
Fabritio Paulus Kumowal
Laurensius F. D. Putranto
Bintang Oka Firmansyah
Matthew Kartawinata

Daftar Isi	i
Kata Sambutan	ii
ISEI Lead Indicators	iii
Ringkasan Eksekutif	01
Kelas Menengah sebagai Korban <i>Backburner Policy</i>	06
Membuka Lapangan Kerja dengan Lompatan Inovasi	14
UMKM sebagai <i>Backbone</i> Perekonomian: Perlu Waspada	23
Meritokrasi dan Penciptaan Generasi Emas	33
Riset Industri: Upaya <i>Shortcut</i> Membangun Bangsa	41
<i>Sociopreneurship</i> Berbasis Potensi Lokal	47



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya publikasi ISEI Lead Indicator 2026: “Rejeki Kumpul, Dapur Ngebul” dapat disusun dan diterbitkan. Laporan ini merupakan wujud kontribusi pemikiran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam membaca, menganalisis, serta merespons dinamika perekonomian Indonesia di tengah perubahan lanskap ekonomi global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Memasuki tahun 2026, perekonomian global berada pada fase perlambatan struktural yang ditandai oleh fragmentasi geoekonomi, normalisasi kebijakan moneter yang tidak seragam di negara maju, ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, serta meningkatnya risiko gangguan rantai pasok dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kondisi tersebut membentuk lingkungan global yang menantang, di mana ruang kebijakan semakin terbatas dan ketahanan ekonomi domestik menjadi faktor penentu keberlanjutan pertumbuhan.

Dalam konteks tersebut, perekonomian Indonesia relatif menunjukkan stabilitas makroekonomi dengan pertumbuhan yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang tetap solid. Namun demikian, stabilitas tersebut tidak terlepas dari tantangan struktural yang mendasar, seperti perlambatan produktivitas, tekanan terhadap daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ketimpangan kualitas lapangan kerja, serta ketergantungan pada sektor-sektor berproduktivitas rendah. Fenomena inilah yang menjadikan tema “Rejeki Kumpul, Dapur Ngebul” relevan, sebagai refleksi atas kebutuhan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga benar-benar dirasakan pada tingkat rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat.

Publikasi ini disusun dengan menghadirkan ISEI Lead Indicator sebagai instrumen analisis yang bersifat inward-looking, guna menangkap sinyal awal perubahan kondisi ekonomi nasional. Indikator-indikator yang digunakan mencerminkan fondasi stabilitas ekonomi Indonesia, mencakup aspek fiskal, energi, pangan, transformasi industri, digitalisasi, kualitas sumber daya manusia, serta inklusi sosial. Dengan pendekatan tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai arah perekonomian Indonesia ke depan, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

Prof. Dr. Hermanto Siregar
Ketua Bidang V PP ISEI

1. Definisi

Indeks Fondasi Stabilitas Ekonomi Indonesia merupakan indeks komposit yang mengukur kekuatan struktural dan kesiapan ekonomi nasional dalam menopang stabilitas makroekonomi jangka panjang. Indeks ini menggabungkan indikator – indikator strategis dari aspek energi, fiskal, pangan, transformasi industri, dan sumber daya manusia.

2. Metodologi

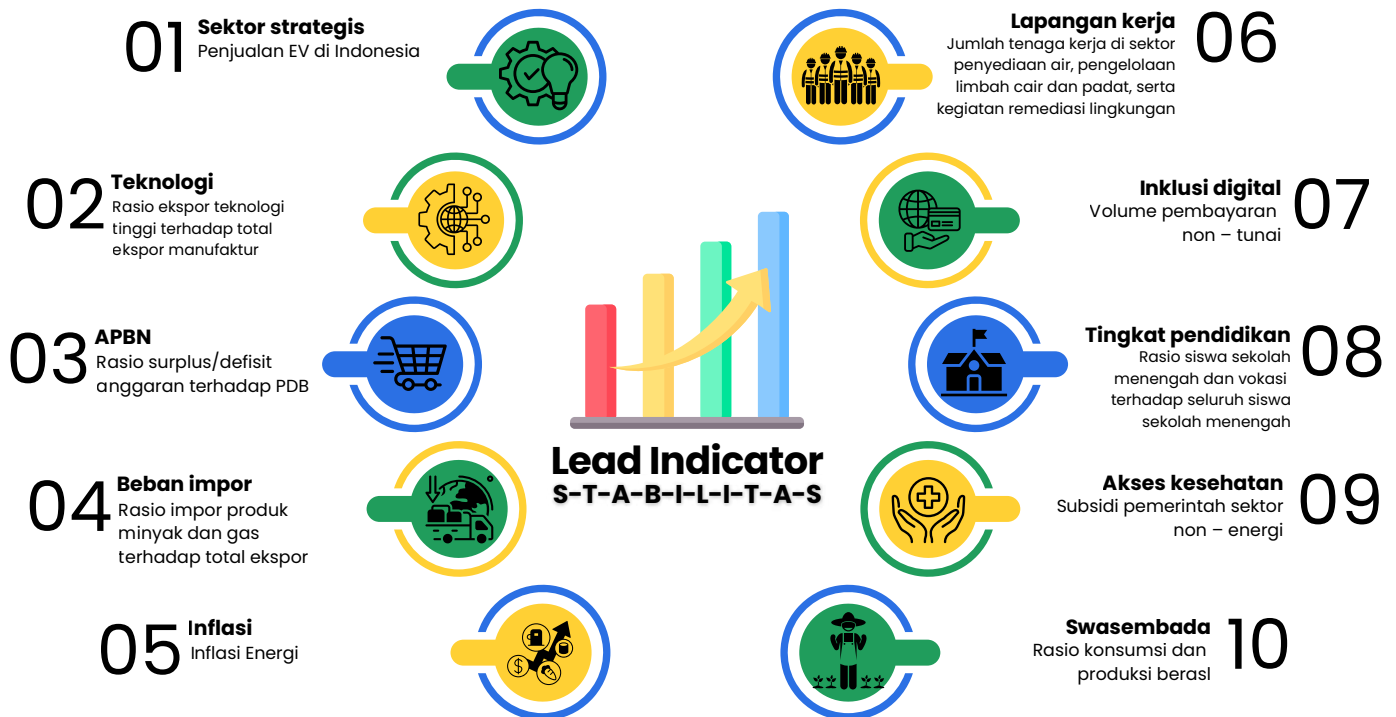
Indeks Stabilitas Ekonomi Indonesia terdiri dari sepuluh variabel yang dianggap mampu menggambarkan kapasitas ekonomi nasional yang dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel	Kode	Unit	Sumber
Penjualan EV di Indonesia	STSC	Unit	CEIC
Rasio ekspor teknologi tinggi terhadap total ekspor manufaktur	TECH	Persentase	CEIC
Rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDB	BDGT	Persentase	CEIC
Rasio impor produk minyak dan gas terhadap total ekspor	IMPT	Persentase	CEIC
Inflasi Energi	INFL	Persentase	CEIC
Jumlah tenaga kerja di sektor penyediaan air, pengelolaan limbah cair dan padat, serta kegiatan remediasi lingkungan	EMPL	Per – seribu orang	CEIC
Volume pembayaran non – tunai	DGIN	Juta	CEIC
Rasio siswa sekolah menengah vokasi terhadap seluruh siswa sekolah menengah	EDUC	Persentase	CEIC
Subsidi pemerintah sektor non – energi	HLTH	Miliar	CEIC
Rasio konsumsi dan produksi beras	FOOD	Persentase	CEIC

Semua nilai variabel yang akan dikomputasi menggunakan nilai observasi dari tahun 2021 – 2026. Pemilihan range periode ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghilangkan anomali perekonomian pada periode pandemic COVID – 19. Pemilihan range tahun 2021 ke atas diharapkan mampu menggambarkan *starting point* dalam menilai kapabilitas ekonomi Indonesia, terutama diperkuat dengan dampak dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ilustrasi 1. Lead Indicator



Penjelasan Tiap Indikator STABILITAS:

- 1. Sektor strategis:** Mengukur penjualan kendaraan listrik (EV) di Indonesia sebagai representasi adopsi teknologi hijau dan kemajuan sektor strategis.
- 2. Teknologi:** Rasio ekspor teknologi tinggi terhadap total ekspor manufaktur, yang mengindikasikan daya saing teknologi nasional di pasar global.
- 3. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Rasio surplus atau defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan kesehatan fiskal negara.
- 4. Beban impor:** Rasio impor produk minyak dan gas terhadap total ekspor, menilai ketergantungan impor energi dan pengaruhnya terhadap neraca perdagangan.
- 5. Inflasi:** Tingkat inflasi energi, yang berperan penting dalam stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
- 6. Lapangan kerja:** Jumlah tenaga kerja di sektor penyediaan air, pengelolaan limbah cair dan padat, serta aktivitas remediasi lingkungan, menggambarkan kontribusi sektor lingkungan dalam penciptaan lapangan kerja.
- 7. Inklusi digital:** Volume pembayaran non-tunai, menilai kemajuan digitalisasi ekonomi dan akses ke layanan keuangan digital.
- 8. Tingkat pendidikan:** Rasio siswa sekolah menengah dan vokasi terhadap seluruh siswa sekolah menengah, yang mencerminkan kesiapan sumber daya manusia untuk sektor industri dan teknis.
- 9. Akses kesehatan:** Subsidi pemerintah untuk sektor non-energi, terkait dengan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat.
- 10. Swasembada:** Rasio konsumsi dan produksi beras, menunjukkan kemandirian pangan nasional yang sangat penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi.

Tabel 2. Raw Data

Tahun	STSC	TECH	BDGT	IMPT	INFL	EMPL	DGIN	EDUC	HLTH	FOOD
2021	254000	7.204	-1.96	0.11500434	-0.0241484	562.726	16761.332	0.51418702	64838.2	1.02616279
2022	10413000	8.304	-0.09	0.11902783	7.89925205	511.15	21991.23	0.49441151	74732.6	1.05014749
2023	11816	9.083	0.36	0.12352678	7.95161564	493.076	27017.126	0.48790602	86521	1.09024833
2024	17724	9.71	-0.622	0.12093021	-0.285	556.713	32420.5	0.48405675	99499.1	1.07352941
2025	27472.2	10.3	-1.24	0.134	2	584.54	38904.6	0.48888	129348.9	1.08867288*
2026	38461.08	11.3	-2.486	0.14631	2.02	631.312	47463.68	0.5084532	174621	1.09413937*

Keterangan :

Proyeksi penulis

* Baseline projection United States Department of Agriculture

Beberapa data observasi yang belum tersedia, dilakukan proyeksi oleh penulis dengan mempertimbangkan beberapa kondisi seperti berikut.

Tabel 3. Asumsi Proyeksi Data

Variabel	Asumsi Proyeksi Data
STSC	Forecast 2026. Mempertimbangkan ketentuan TKDN dan kuota impor BBM.
TECH	Forecast 2026. Mempertimbangkan hilirisasi berbasis SDA dan investasi teknologi.
BDGT	Forecast 2026. Mempertimbangkan MBG, Deb-Service Ratio, dan lonjakan anggaran pada sektor pertahanan.
IMPT	Forecast 2026. Mempertimbangkan harga minyak global turun sedikit, peningkatan ekspor sektor pertanian dan perkebunan, dan peningkatan konsumsi energi domestic.
INFL	Forecast 2026. Mempertimbangkan potensi inflasi dari penempatan dana Rp. 200 T kepada bank Himbara.
EMPL	Forecast 2026. Mempertimbangkan pertumbuhan penduduk moderat dan program Waste to Energy dari Danantara.
DGIN	Forecast 2026. Mempertimbangkan digitalisasi terus berjalan, masifnya cashless pada semua industri, namun pertumbuhan melambat karena pasar jenuh dan kompetitif.
EDUC	Forecast 2026. Mempertimbangkan struktur permintaan pasar tenaga kerja akan tenaga kerja terampil dan prediksi penurunan Return on Education
HLTH	Forecast 2026. Mempertimbangkan alokasi tambahan untuk MBG dan meningkatnya perhatian pada program pengecekan Kesehatan masyarakat.
FOOD	Forecast 2026. Dilakukan oleh United States Department of Agriculture dengan baseline projections

Tabel 4. Besaran Proyeksi Data

Variabel	Proyeksi	Komponen	Perubahan	Besaran Proyeksi
STSC	2026	1. TKDN 2. Rasio SPKLU terhadap EV 3. Kuotasi impor BBM	1. SPKLU meningkat >100%	40%
TECH	2026	1. Hilirisasi berdasar SDA 2. Investasi teknologi	1. Ketidakpastian ekonomi global mulai terakomodasi.	9%
BDGT	2026	1. Rp335 T alokasi MBG 2. Alokasi sektor pertahanan meningkat 3. Debt-Service Ratio	1. Lonjakan akibat MBG 2. Peningkatan alokasi pada sektor pertahanan 3. Kemampuan membayar hutang nasional	-100%
IMPT	2026	1. Harga minyak cenderung turun 2. Peningkatan ekspor pertanian & perkebunan 3. Konsumsi energi domestic cenderung naik	1. Harga minyak cenderung turun akibat transisi energi listrik pada tahap awal	9%
INFL	2026	1. Potensi inflasi dari injeksi likuiditas 200 T	1. Dipicu dari mekanisme transmisi penyaluran dana dan perubahan suku bunga ke sektor riil	1%
EMPL	2026	1. Penduduk tumbuh 2. Program Waste to Energy Danantara dari Patriot Bond	1. Pertumbuhan penduduk sekitar 1% 2. Injeksi dana sebesar Rp 50 T	8%
DGIN	2026	1. <i>Ekspansi Cross Border</i> 2. <i>Mobile internet transaction</i> 3. <i>Volume transaksi QRIS tumbuh</i>	1. Rata - rata peningkatan volume transaksi QRIS > 100%	22%
EDUC	2026	1. Membutuhkan tenaga kerja terampil 2. Return on Education 2026 turun	1. Dipicu oleh semakin terbatasnya lapangan kerja untuk tenaga kerja terdidik	4%
HLTH	2026	1. Alokasi dana untuk sektor Kesehatan meningkat 2. Program MBG 3. Program ketahanan pangan	1. Alokasi dana untuk sektor Kesehatan sebesar Rp 244 T 2. Sebesar 4,26% alokasi APBN untuk sektor ketahanan pangan	35%

Sumber : Office of Chief Economist ISEI

Tahapan komputasi indeks komposit dimulai dari melakukan normalisasi semua data ke dalam bentuk standardized value menggunakan metode standarisasi berikut.

$$XS_{ij} = \frac{X_{ij} - \min X_j}{\max X_j - \min X_j} \quad (1)$$

Dimana:

XS_{ij} : *Standardized value* yaitu nilai hasil standarisasi yang berada dalam interval 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat kestabilan yang lebih tinggi, dan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kestabilan yang rendah. X

X_{ij} : Nilai variabel j untuk negara i

$\min X_j$: Nilai minimum variabel j

$\max X_j$: Nilai maksimum variabel j

Setelah dilakukan standarisasi nilai, langkah berikutnya adalah menghitung indeks komposit dari sepuluh variabel dengan bobot seimbang sesuai perhitungan berikut.

$$Komposit = \frac{STSC + TECH + BDGT + IMPT + INFL + EMPL + DGIN + EDUC + HLTH + FOOD}{10} \quad (2)$$

3. Hasil

Berdasarkan hasil standarisasi nilai dan penghitungan indeks komposit, maka diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 5. Hasil Indeks Komposit

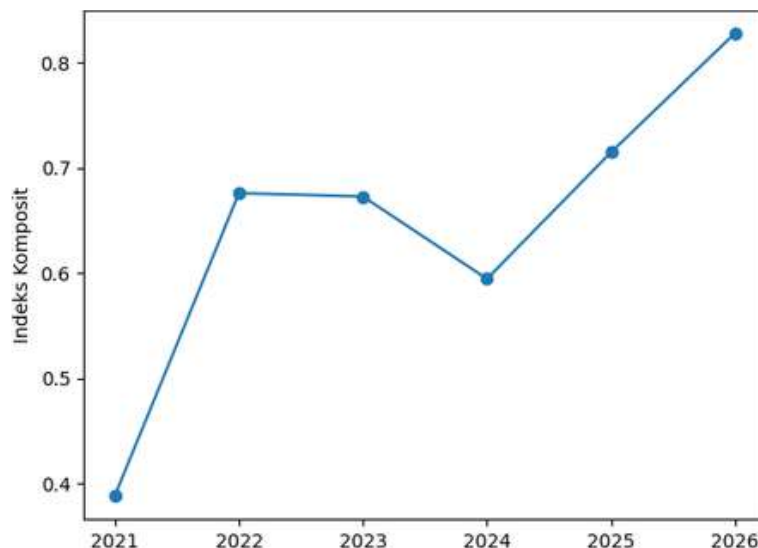
Tahun	Indeks Komposit
2021	0.3885933
2022	0.6757724
2023	0.6725772
2024	0.5943381
2025	0.7145011
2026	0.827584

Keterangan :

2024 : *partially projected*

2025 : *fully projected*

Gambar 1. Visualisasi Grafis



Sumber : Office of Chief Economist ISEI

Gambar 2. Kontribusi Variabel Perubahan Indeks Tahun 2026

2026									
STSC	TECH	BDGT	IMPT	INFL	EMPL	DGIN	EDUC	HLTH	FOOD
.000095	.0183219	-.0431251	.0177532	.0002303	.0145697	.033283	.0038541	.0155705	.0528113

Sumber : Office of Chief Economist ISEI

4. Kesimpulan

Secara umum, dengan mempertimbangkan proyeksi pada tahun 2025 – 2026, perhitungan indeks menunjukkan angka positif. Akan tetapi, pertumbuhan indeks pada tahun 2026 (15% y- on – y) cenderung melambat apabila dibandingkan dengan tahun 2025 (20% y- on – y). Hal ini mengindikasikan bahwa, perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi makroekonomi yang cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi dalam jangka panjang, meskipun dengan catatan adanya perlambatan pada komponen – komponen tertentu.

Secara khusus, perkiraan pada akhir tahun 2026, menjelaskan bahwa kenaikan indeks yang didominasi oleh rasio impor produk minyak dan gas terhadap total ekspor menggambarkan prediksi bahwa Indonesia akan cenderung meningkatkan ketergantungan pada impor bahan bakar. Kondisi ini diperkirakan akan sejalan dengan peningkatan kebutuhan konsumsi energi domestik yang belum sejalan dengan kapasitas produksi energi domestic. Kesenjangan konsumsi dan produksi ini kemungkinan akan diakomodasi melalui mekanisme impor untuk tetap menjaga kestabilan harga BBM nasional. Sementara itu, variabel rasio defisit anggaran pemerintah, dalam jangka panjang, masih menjadi penghambat terbesar pada kapasitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Serupa dengan prediksi pada tahun 2025, kondisi ini diperkirakan akan terus membebani stabilitas ekonomi jangka panjang yang diperburuk dengan perubahan dinamika politik setiap lima tahun sekali.

Ringkasan Eksekutif

Memasuki periode 2025–2027, perekonomian global berada dalam rezim **ketidakpastian struktural yang bersifat persisten, bukan episodik**. Ketidakpastian tersebut tidak lagi semata dipicu oleh guncangan geopolitik, melainkan semakin di dominasi oleh **volatilitas kebijakan ekonomi negara besar, khususnya kebijakan perdagangan, industri, dan fiskal**. Gelombang pemilu global pada 2024 yang mencakup hampir separuh populasi dunia dan sekitar 60% PDB global telah memperkuat kecenderungan **kebijakan inward-looking dan proteksionis**.

Kembalinya Amerika Serikat pada pendekatan kebijakan perdagangan yang unilateral melalui **penerapan tarif resiprokak sejak April 2025** menandai pelemahan lebih lanjut terhadap multilateralisme global. Respons negara mitra dagang yang beragam mulai dari retaliasi hingga negosiasi bilateral mencerminkan meningkatnya fragmentasi geoekonomi dan menguatnya bilateralisme serta minilateralisme. Dalam konteks ini, **risiko global tidak selalu termanifestasi dalam bentuk krisis besar, tetapi hadir sebagai ketidakpastian kebijakan yang menekan ekspektasi pelaku usaha**,

Gambar 3. Pengumuman Pengenaan Tarif Resiprokak

Reciprocal Tariffs			Reciprocal Tariffs		
Country	Tariffs Charged to the U.S.A. including Customs Brokerage and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs	Country	Tariffs Charged to the U.S.A. including Customs Brokerage and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
China	67%	34%	Peru	10%	10%
European Union	39%	20%	Nicaragua	36%	18%
Vietnam	90%	46%	Norway	30%	15%
Taiwan	64%	32%	Costa Rica	17%	10%
Japan	46%	24%	Jordan	40%	20%
India	52%	26%	Dominican Republic	10%	10%
South Korea	50%	25%	United Arab Emirates	10%	10%
Thailand	72%	36%	New Zealand	20%	10%
Switzerland	61%	31%	Argentina	10%	10%
Indonesia	64%	32%	Ecuador	12%	10%
Malaysia	47%	24%	Guatemala	10%	10%
Cambodia	97%	49%	Honduras	10%	10%
United Kingdom	10%	10%	Madagascar	93%	47%
South Africa	60%	30%	Myanmar (Burma)	88%	44%
Brazil	10%	10%	Tunisia	55%	28%
Bangladesh	74%	37%	Kazakhstan	54%	27%
Singapore	10%	10%	Serbia	74%	37%
Israel	33%	17%	Egypt	10%	10%
Philippines	34%	17%	Saudi Arabia	10%	10%
Chile	10%	10%	El Salvador	10%	10%
Australia	10%	10%	Côte d'Ivoire	41%	21%
Pakistan	58%	29%	Laos	95%	48%
Turkey	10%	10%	Botswana	74%	37%
Sri Lanka	88%	44%	Trinidad and Tobago	12%	10%
Colombia	10%	10%	Morocco	10%	10%

Sumber: The White House (2025)

meningkatkan volatilitas pasar keuangan, dan mengganggu rantai pasok global.

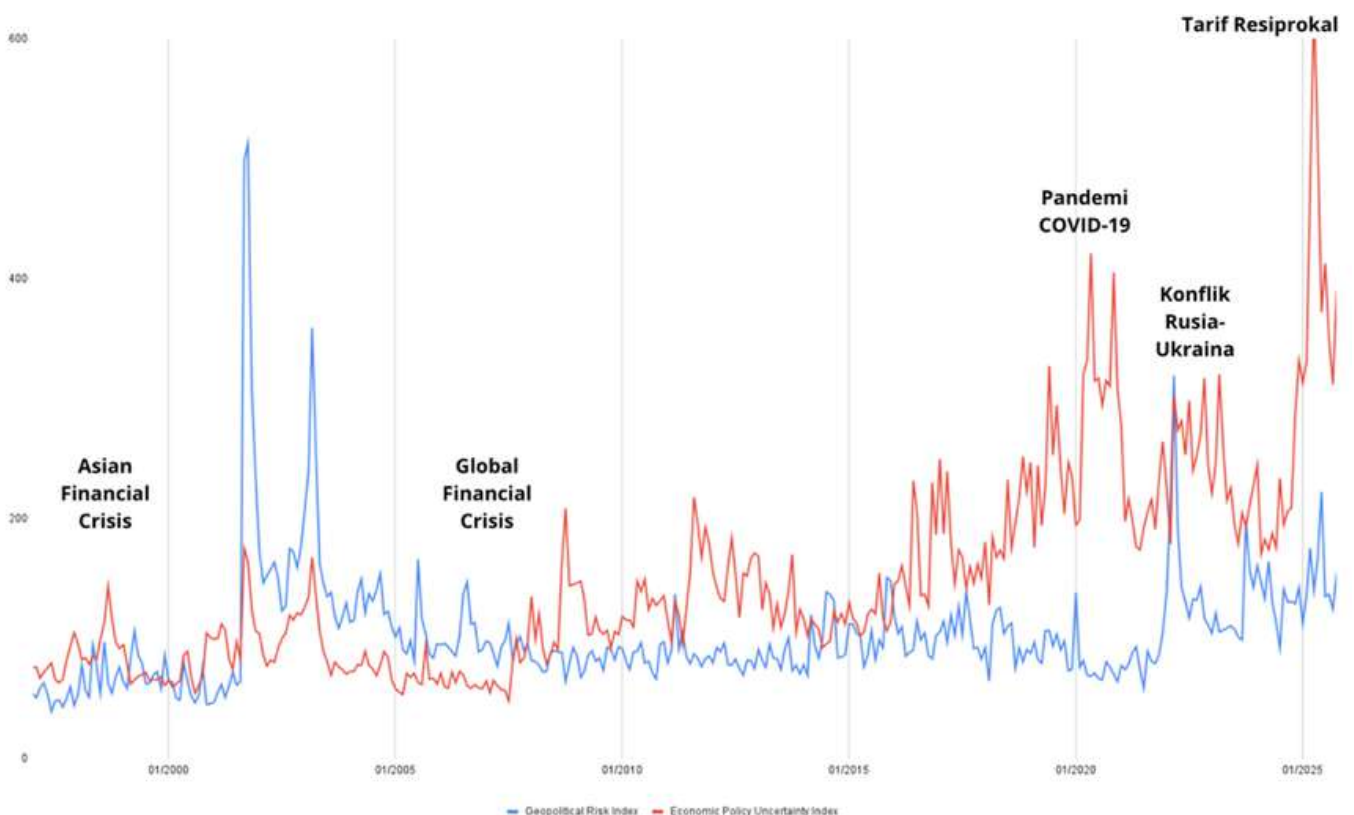
Berbagai reaksi dilakukan oleh negara yang dikenakan tarif dan akhirnya menimbulkan polarisasi yang tajam. Negara yang tergabung dalam BRICS misalnya merespon beragam dimana Tiongkok melakukan retaliasi dan sisanya melakukan diplomasi untuk mendapatkan tarif lebih rendah dari yang diberi oleh Presiden Donald Trump.

Sedangkan negara yang tergabung dalam G7, OECD, dan NATO juga melakukan penolakan terhadap pengenaan tarif **namun akhirnya melakukan negosiasi tarif melalui diplomasi perdagangan.** Kebijakan Donald Trump ini membuat **memudarnya multilateralisme serta near and friend shoring.** Pasca kebijakan tarif resiprokal ini banyak negara menunggu antrian untuk

melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan membuat menguatnya bilateralisme dan minilateralisme. Tetapi berbagai polarisasi ini akhirnya membuat menguatnya rivalitas antar negara misalnya seperti **memburuknya hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat** berbagai rivalitas juga muncul seperti konflik antara Tailan dengan Kamboja, Jepang dengan Tiongkok, dan masih panasnya perang Ukraina-Rusia.

Namun apabila dilihat dalam gambar 4, diketahui bahwa **risiko kedepan lebih terhadap ketidakpastian dari kebijakan ekonomi bukan hanya perubahan geopolitik semata.** Berdasarkan trajektori dari tahun 1997 terjadinya Asian Financial Crisis hingga Penerapan tarif resiprokal terjadi dinamika peningkatan risiko tajam pada kebijakan ekonomi terutama pasca

Gambar 4. Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)



Sumber: CEIC (2025, diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

terjadinya Global Financial Crisis tahun 2008. Tetapi pada risiko dari geopolitik, terjadi tren peningkatan risiko terutama pasca perang Rusia-Ukraina sebelum kembali dalam tren penurunan.

Di tengah tekanan tersebut, **pertumbuhan ekonomi global menunjukkan daya tahan yang relatif baik**. Namun, ketahanan ini bersifat tidak merata. Negara maju menghadapi perlambatan struktural akibat **penuaan demografi, stagnasi produktivitas, serta keterbatasan ruang kebijakan makroekonomi**. Sebaliknya, negara berkembang menjadi motor pertumbuhan, **ditopang oleh struktur demografi yang lebih kuat dan permintaan domestik yang solid**. Meski demikian, pertumbuhan negara berkembang rentan terhadap transmisi risiko global

melalui jalur perdagangan, harga komoditas, dan arus modal. Dalam lanskap global yang terfragmentasi , Indonesia menempati posisi yang relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% menempatkannya sebagai “bright spot” di negara berkembang. Namun belum cukup apabila mimpi kita adalah mengeluarkan Indonesia dari middle income trap, karena angka 5% berada dibawah potential growth sebesar 6,5 - 6,7%.

Proyeksi pertumbuhan yang meningkat pada 2026 mencerminkan kapasitas ekonomi Indonesia untuk tetap tumbuh meskipun menghadapi tekanan eksternal. Namun demikian, capaian tersebut perlu dibaca secara risk-adjusted. Hasil ISEI Lead Indicator 2026 menunjukkan bahwa **tingkat stabilitas ekonomi Indonesia berada pada**

Tabel 6. Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)

Tahun	Indonesia	Negara Berkembang	Negara Maju	Global
2018	5,17	4,6	2,3	3,2
2019	5,02	3,8	1,7	2,6
2020	-2,07	-1,5	-4,3	-3,1
2021	3,69	7,3	5,5	6,3
2022	5,31	3,8	2,9	3,3
2023	5,05	4,4	1,6	2,8
2024	5,03	4,3	1,7	2,8
F-2025	5,2	4,2	1,7	2,7
F-2026	5,4	4	1,6	2,6
F-2027	7	4,1	1,6	2,7

Sumber: CEIC, Kemenkeu RI, Bappenas RI (2018-2025)

level tinggi dan cenderung menguat. Penguatan ini terutama ditopang oleh kemajuan digitalisasi ekonomi, stabilitas sektor pangan, serta dominasi negara yang memperkuat daya tahan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut berperan sebagai jangkar stabilitas dalam jangka pendek hingga menengah bukan jangka panjang.

Di sisi lain, indikator yang sama juga mengungkapkan meningkatnya sejumlah risiko domestik yang bersifat struktural. Tekanan fiskal menjadi salah satu sumber risiko utama, **bukan semata karena besaran defisit, melainkan akibat meningkatnya rigiditas belanja program sosial mercusuar** yang membatasi fleksibilitas kebijakan fiskal dalam merespons guncangan. Selain itu, stabilitas makroekonomi saat ini masih sebagian ditopang oleh mekanisme penyesuaian eksternal melalui impor, khususnya sektor energi, yang meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas harga global.

Risiko domestik lainnya muncul dari **melemahnya daya beli dan ketahanan kelas menengah secara gradual.** Meskipun konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, terdapat indikasi penurunan kualitas konsumsi dan terbatasnya ruang tabungan, yang berpotensi melemahkan transmisi kebijakan moneter dan daya tahan permintaan domestik dalam jangka menengah. Di sektor digital, tingginya aktivitas transaksi telah berkontribusi terhadap stabilitas, namun dampaknya terhadap **peningkatan produktivitas riil masih memerlukan penguatan integrasi dengan sektor-sektor produktif.**

Dengan demikian, tantangan utama perekonomian Indonesia ke depan tidak terletak pada menjaga stabilitas semata, melainkan pada mengonversi stabilitas tersebut menjadi **transformasi struktural yang berkelanjutan.** Dalam lingkungan global yang ditandai oleh ketidakpastian kebijakan dan fragmentasi ekonomi,

Gambar 5. Kerangka Risiko Ekonomi: Fragmentasi Global dan Tantangan Domestik

 Risiko Global	 Risiko Domestik
 The Great Tension	 Ketahanan Fiskal
 Global Financial Debt	 Bencana Hidrometeorologi
 Economic Freeze & AI Bubble	 Pelemahan Nilai Tukar
 The Wealth Transfer	 Polarisasi & Ketimpangan Sosial

Sumber: CEIC, Kemenkeu RI, Bappenas RI (2018-2025)

stabilitas yang tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas, ketahanan energi, dan ruang kebijakan fiskal yang memadai berisiko menjadi stabilitas yang rapuh dan semu.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi Indonesia 2026 **tetap positif**, namun dibayangi oleh risiko domestik dan global yang semakin kompleks. Oleh karena itu ISEI memandang perlunya: 1) Kebijakan ekonomi ke depan perlu diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan pertumbuhan tetapi stabilitas dan distribusi pendapatan; 2) Mendorong ruang penurunan suku bunga, rasionalisasi yield SBN & SRBI untuk mendorong transmisi

kebijakan moneter dan juga penyaluran kredit; 3) Mendorong partisipasi swasta melalui “peran dengan negara” bukan hanya “peran negara” melalui skema KPBU, PINA, LVC agar terciptanya demand dari sektor riil; 4) Menjaga pasar domestik dengan kebijakan safeguard, anti dumping, dan juga law enforcement pada sektor underground economy 5) Memperkuat fondasi struktural terutama melalui perijinan & konsistensi kebijakan perdagangan serta perindustrian; 6) Memberikan insentif optimal untuk mendorong konsumsi dan swasta dengan penurunan PPN, penyesuaian PTKP, skema perpajakan alternatif (tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax).



Kelas Menengah sebagai Korban *Backburner Policy*

Rumah tangga kelas menengah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menegaskan bahwa **kelas menengah memberikan peran sangat krusial sebagai bantalan ekonomi nasional**. Seiring meningkatnya konsumsi domestik, kelompok ini turut **berkontribusi melalui penerimaan pajak yang secara tidak langsung dikenakan atas setiap konsumsi yang mereka lakukan**. Banyak kelompok kelas menengah juga ikut andil sebagai pengusaha lokal dan investasi langsung baik secara privat maupun publik di pasar keuangan. Sehingga, **kelompok ini perlu menjadi perhatian penting bagi negara untuk menjaga daya beli masyarakat** yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.

Di tengah kontribusi kelas menengah sebagai **tulang punggung** ekonomi nasional, kelompok ini menghadapi banyak tantangan krusial. Kenaikan harga barang pokok seringkali mencekik kondisi ekonomi mereka. Meskipun beberapa dari mereka memiliki pendapatan yang relatif stabil, tetap saja tabungan terkuras lebih banyak karena **jumlah pengeluaran yang kian melonjak akibat kenaikan harga**. Dalam hal kebijakan fiskal, Pemerintah cenderung mengutamakan insentif dan bantuan sosial untuk kelas bawah sehingga timbul berbagai kondisi tekanan finansial yang dirasakan oleh kelompok ini. Oleh karena itu, **kelas menengah berada pada kondisi yang stagnan dan sulit mengalami kemajuan**. Hal tersebut memicu kelas menengah sebagai **korban backburner** karena keberadaannya tidak menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

Seiring berkembangnya teknologi secara masif, kelas menengah juga terdampak oleh adanya **pengurangan penyerapan tenaga kerja dari berbagai instansi atau perusahaan yang telah menerapkan efisiensi berbasis teknologi**. Faktor yang ini menjadi tekanan bagi kelas menengah harus melakukan reskilling menggunakan biaya pribadi di tengah minimnya insentif dari pemerintah. Oleh sebab itu, beberapa individu yang **tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi akan berpotensi turun menjadi kelompok rentan miskin** dan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Mengingat hal tersebut, tahun 2026 menjadi titik kritis bagi kelas menengah apakah akan mengalami kemajuan atau justru terus tertekan dengan adanya **ketidakstabilan ekonomi dan minimnya dukungan Pemerintah**. Keberhasilan kelas menengah sangat bergantung pada implementasi kebijakan pemerintah yang tidak lagi hanya fokus pada kelas tertentu namun secara inklusif dapat memaksimalkan potensi dari tiap kelompok sosial. Pemberian dukungan dan arah kebijakan yang tepat sasaran dapat memberikan ruang bagi kelas menengah untuk **tetap tumbuh dan berinovasi**. Kemajuan kelas menengah akan menciptakan efek domino yang positif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia yang lebih maju.

Kelas Menengah: Kondisi Saat Ini dan Posisi Ideal

Kelas menengah menjadi kelompok yang mendominasi kependudukan di Indonesia.

Kelompok ini membawa pengaruh sangat besar bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 menyebutkan **sebagian besar penduduk Indonesia merupakan penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah dengan persentase sebesar 66,35 persen.** Kedua kelompok tersebut **menyumbangkan pengeluaran paling tinggi di Indonesia sebesar 81,49 persen dari konsumsi rumah tangga nasional.**

Setiap penduduk memiliki pengeluaran dan gaya hidup yang beragam. Perhitungan jumlah pengeluaran seringkali digunakan oleh berbagai institusi global sebagai indikator untuk mengukur kelompok kelas masing-masing penduduk. Bank Dunia menggunakan indikator Purchasing Power Parity dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat antar negara untuk memantau tingkat kemiskinan. Namun, tidak semua negara termasuk Indonesia relevan dengan tolak ukur Bank Dunia. Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur angka kemiskinan dengan Garis Kemiskinan (GK). Pada Maret 2025, BPS mencatatkan garis kemiskinan nasional di Indonesia sebesar Rp609.160 per kapita per bulan.

BPS membuat ukuran klasifikasi tiap kelas penduduk di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung dengan pendekatan cost of basic needs.

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan dasar penduduk yang meliputi kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan. BPS membagi populasi menjadi lima kelompok, yaitu miskin (di bawah GK), rentan miskin (1,0 – 1,5 kali GK), menuju kelas menengah (1,5 – 3,5 kali GK), kelas menengah (3,5 – 17 kali GK), hingga kelas atas (17 kali GK).

Rumah tangga kelas menengah seringkali merasakan **pendapatan yang stagnan, namun pengeluaran justru meningkat signifikan karena lonjakan harga bahan pokok dan biaya lainnya.** Hal tersebut menyebabkan kelas menengah terjebak dalam situasi yang memprihatinkan. Para ekonom mengartikan fenomena ini sebagai **fenomena makan tabungan (ManTab).** Pertumbuhan ekonomi yang lambat menghambat rumah tangga kelas menengah untuk maju dan keluar dari status pendapatan rendah.

Di sisi lain, **kelompok ini berisiko jatuh ke kelompok rentan miskin yang disebabkan oleh situasi seperti kehilangan pekerjaan dan inflasi yang kian meningkat.** Posisi ideal bagi kelas menengah bukan lagi hanya sekedar bertahan di atas garis kemiskinan, tetapi mereka menginginkan kemampuan finansial yang mapan dan bisa melakukan investasi untuk mencapai beragam



keinginannya di masa mendatang. Saat ini, sebagian besar dari **pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya hidup.**

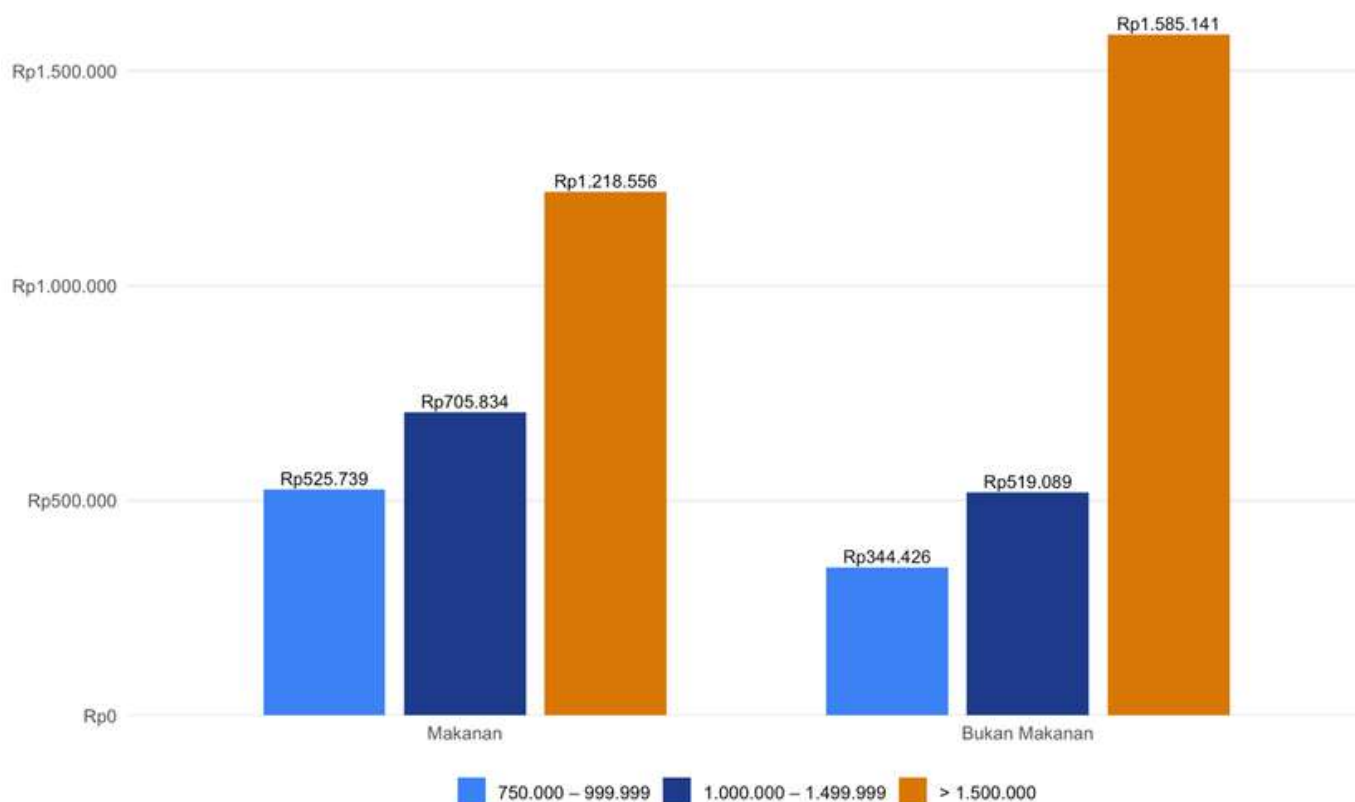
Berdasarkan data dari BPS (2025) menunjukkan bahwa kelompok dengan pengeluaran total diatas Rp1.500.000 memiliki pengeluaran per kapita sebulan yang cenderung lebih besar untuk biaya bukan makanan dibandingkan biaya makanan. Besarnya biaya bukan makanan yang dialokasikan oleh individu mengindikasikan tekanan dalam memenuhi kebutuhan sekunder yang penting, seperti biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Kecenderungan individu untuk memenuhi beragam kebutuhan non pokok akan menguras tabungan lebih besar. Kondisi kelas menengah saat ini terjebak dalam pendapatan yang stagnan dan

kenaikan biaya secara drastis. Namun sebagian dari mereka dengan sengaja melakukan habit *frugal living* untuk menjaga tabungan dan investasi tetap aman.

Fenomena tersebut dapat berdampak pada pelemahan daya beli nasional. Menurut PERBANAS (2025), **lemahnya daya beli masyarakat pada kelas menengah dan bawah akan menimbulkan perlambatan permintaan agregat domestik.** Dalam hal ini, peran Pemerintah sangat penting untuk menjaga daya beli kelas menengah tetap solid dengan tetap memastikan kesejahteraan pada tiap individu.

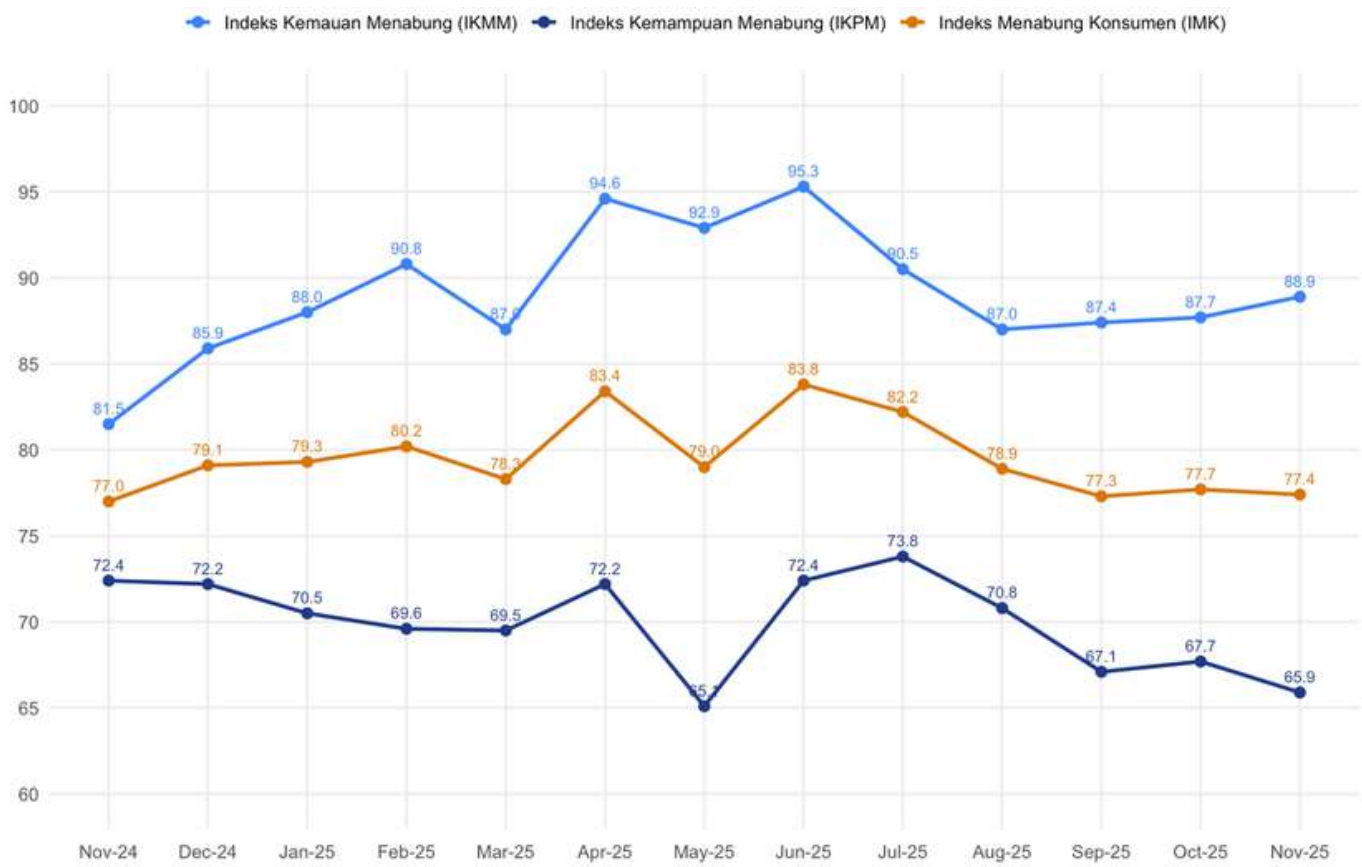
Dinamika perekonomian saat ini juga menciptakan berbagai perspektif baru bagi masyarakat, salah satunya dalam hal menyimpan tabungan. Data dari LPS (2025) menunjukkan Indeks Kemauan Menabung,

Gambar 6. Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)



Sumber: BPS (2025)

Gambar 7. Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)



Sumber: LPS (2025)

Indeks Kemampuan Menabung (IKPM), dan Indeks Menabung Konsumen (IMK) cenderung memiliki **pergerakan yang relatif sama sepanjang tahun 2024 hingga 2025**. Pada Mei 2025 telah terjadi penurunan yang drastis pada nilai IKMM, IKPM, dan IMK meskipun dapat kembali meningkat pada bulan Juni. Namun, sepanjang akhir tahun 2025, terlihat bahwa individu **kembali menurunkan keinginan dan kemampuan menabung**.

Nilai IKMM yang cenderung rendah **mencerminkan sisa pendapatan individu yang kecil untuk menabung**. Pendapatan mereka telah banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan biaya hidup. Disamping itu, kenaikan biaya dari waktu ke waktu juga menurunkan kemampuan mereka untuk menabung dalam jumlah yang besar.

Penduduk kelas menengah menginginkan kehidupan yang **ideal secara finansial** terlihat dari kemauan menabung yang relatif tinggi. Individu pada level ini memiliki **ekspektasi yang besar untuk memperoleh tempat hunian yang layak, jaminan hari tua, kemudahan akses transportasi, dan pemenuhan gaya hidup di masa mendatang**.

Namun, sebagian besar dari mereka saat ini hanya memiliki pendapatan yang stagnan dan terkena berbagai tantangan seperti inflasi, tarif pajak, dan ketidakstabilan ekonomi. Meskipun telah memperoleh pendapatan secara rutin tiap bulan, mereka masih mengalami banyak permasalahan finansial yang serius. Sehingga, keinginan dan ekspektasi yang besar akan sangat sulit untuk tercapai jika tidak adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang

fokus pada potensi kelas menengah secara berkelanjutan.

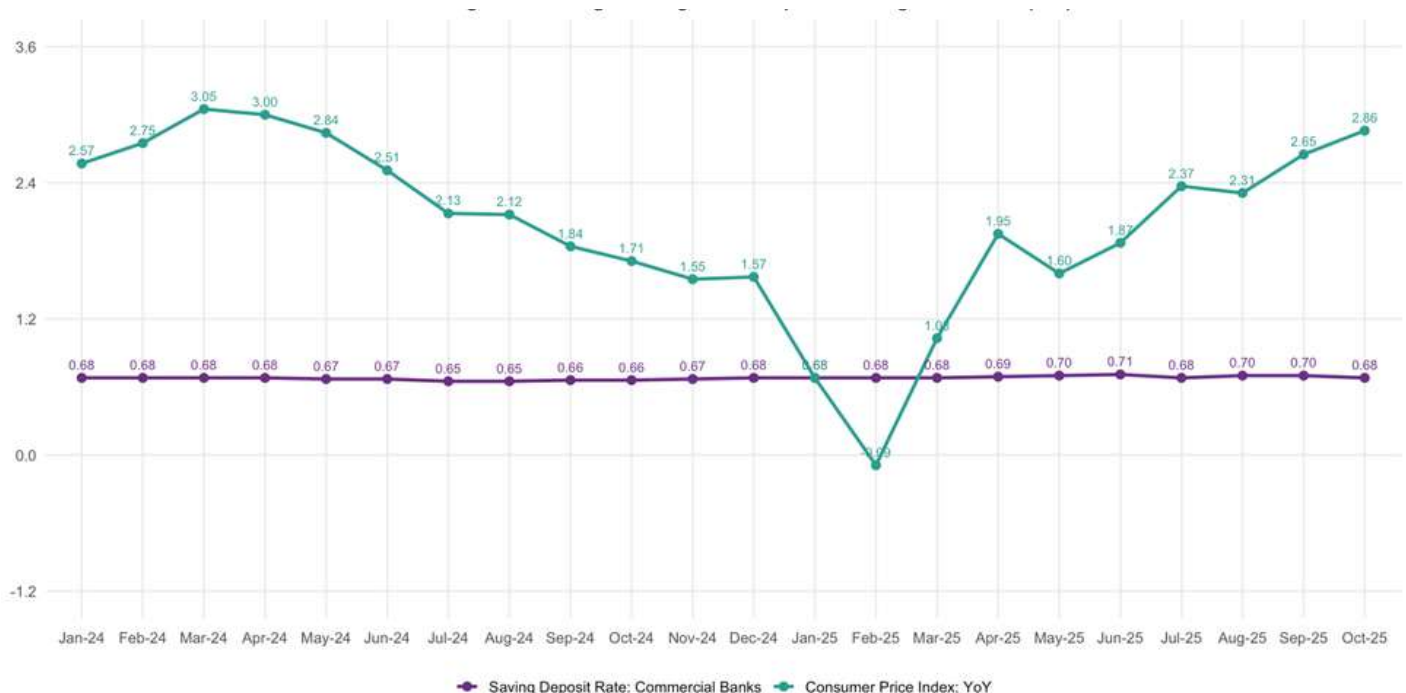
Strategi Meningkatkan Pendapatan

Ketimpangan antara indeks kemampuan dan kemauan menekankan bahwa penduduk kelas menengah bukan lagi membutuhkan lebih banyak literasi keuangan, **tetapi mereka memerlukan pendapatan dan biaya hidup yang lebih terjangkau**. Posisi ideal bagi kelas menengah seharusnya memiliki surplus keuangan secara konsisten sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melakukan investasi masa depan dan jaminan hari tua tanpa harus bergantung pada fasilitas jaring pengaman sosial dari pemerintah. Kondisi yang menghambat mereka untuk berinvestasi dapat memperbesar risiko kegagalan kelompok ini untuk bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi peningkatan pendapatan perlu

dilakukan baik secara individu maupun dukungan langsung dari pemerintah. Berdasarkan data dari CEIC (2025), **pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) relatif jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga tabungan**. Hal ini menciptakan fenomena tidak efektifnya tabungan sebagai simpanan masyarakat dalam jangka panjang. Investasi menjadi alternatif solusi untuk menjaga kekayaan lebih stabil dibandingkan hanya menabung di bank yang memiliki risiko tergerusnya nilai tabungan dengan laju pergerakan harga barang pokok yang semakin meningkat. Kondisi ini menciptakan fenomena di mana kelas menengah **memerlukan instrumen investasi yang dapat menjamin perlindungan kekayaan mereka dalam jangka panjang**.

Strategi penguatan pendapatan menjadi langkah yang krusial bagi keberlangsungan finansial kelas menengah. Peningkatan

Gambar 8. Perbandingan Suku Bunga Tabungan terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK)



Sumber: CEIC (2025)

pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan iuran lainnya (disposable income) **dapat menciptakan surplus keuangan yang lebih lebar bagi penduduk kelas menengah.** Sisa pendapatan ini dapat dialokasikan pada instrumen keuangan yang stabil dan berpotensi memberikan keuntungan di masa mendatang.

Kebijakan fiskal turut memberikan pengaruh yang besar untuk memperkuat daya beli kelas menengah. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki alternatif untuk memberikan insentif pajak melalui skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang rendah. **Rencana penurunan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah dari 11 persen menjadi 8 persen** merupakan langkah yang bijak untuk memulihkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional. Dengan adanya penurunan pajak, biaya yang dikeluarkan oleh konsumen akan terasa lebih ringan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kebijakan ini juga secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan pengusaha lokal atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menciptakan inovasi yang lebih optimal.

Posisi yang ideal untuk kelas menengah dalam mencapai kebebasan finansial hanya dapat diwujudkan melalui perubahan pandangan mengenai pengeluaran yang berlebihan menjadi penggunaan investasi yang lebih cerdas. Mengingat suku bunga pada simpanan bank jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi, sangat penting bagi kelas menengah untuk didorong dalam mencari peluang investasi yang lebih menguntungkan. Hal ini bertujuan agar kekayaan mereka tidak tergerus oleh kenaikan harga yang terus berlangsung. Memilih investasi menjadi opsi yang lebih bermanfaat untuk menjaga

stabilitas kekayaan dibandingkan hanya menyimpan uang di bank, yang berisiko terus mengalami penurunan nilai riil.

Aspek penting untuk mencapai kemandirian bagi masyarakat kelas menengah adalah dengan menjalin kolaborasi antara kebijakan yang dibuat Pemerintah, **melalui harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter, demi menjaga kestabilan harga.** Selain itu, keberanian dari kalangan kelas menengah untuk menempatkan dana mereka dalam sektor-sektor yang produktif juga sangat diperlukan. Untuk mendapatkan kualitas hidup yang memuaskan serta jaminan di masa tua tanpa bergantung pada bantuan dari Pemerintah, kelas menengah harus lebih cermat dalam mengelola aliran kas. Pendekatan ini harus dilaksanakan dengan cara mempertahankan stabilitas finansial, di mana setiap kenaikan pendapatan disalurkan untuk meningkatkan investasi pribadi, **daripada hanya meningkatkan konsumsi yang tidak memberikan keuntungan dalam jangka panjang.**

Chilean Paradox

Literatur pembangunan menegaskan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi bersifat sementara dan hanya terjadi satu kali dalam siklus pembangunan suatu negara. Apabila periode ini tidak dimanfaatkan secara optimal untuk membangun fondasi struktural yang kuat, seperti **peningkatan kualitas pendidikan, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan ekosistem industri yang berdaya saing** maka peluang peningkatan kesejahteraan jangka panjang berisiko hilang secara permanen (ADBI, 2025). Pengalaman negara-negara berpendapatan menengah menunjukkan bahwa

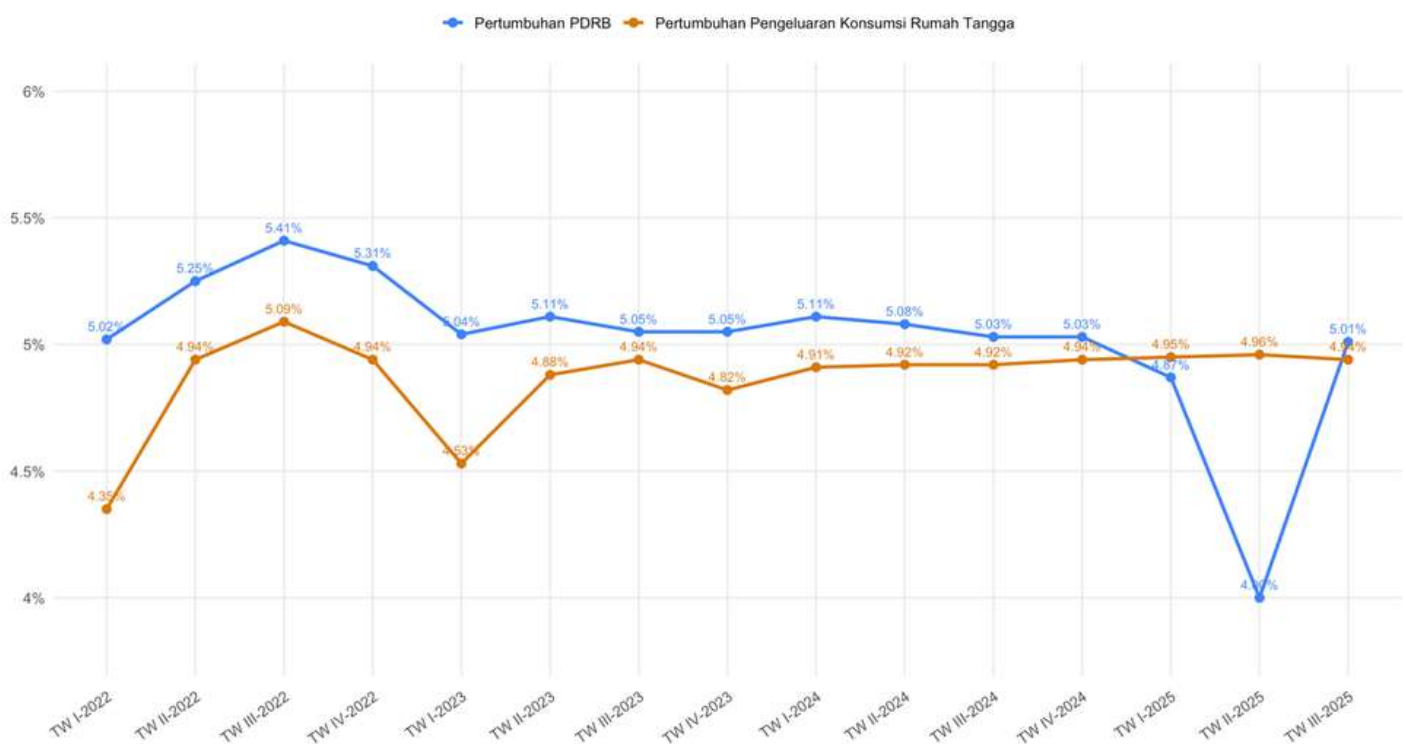
pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi transformasi struktural cenderung berhenti pada fase konvergensi parsial dan gagal mengejar frontier ekonomi global.

Temuan mengenai kerentanan kelas menengah dan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia sejalan dengan kerangka tersebut. Meskipun pendapatan per kapita meningkat secara agregat, peningkatan tersebut **belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan struktur ekonomi rumah tangga dan peningkatan kapasitas konsumsi berkelanjutan** (World Bank, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kelompok kelas menengah yang menjadi penopang utama perekonomian domestik. Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi risiko Chilean Paradox, yaitu kondisi ketika

perekonomian menunjukkan kinerja pertumbuhan yang relatif kuat secara makro, **namun rapuh secara struktural**. Pertumbuhan yang bertumpu pada ekspansi sektor tertentu dan konsumsi domestik **tanpa diimbangi peningkatan produktivitas, kapasitas sumber daya manusia, serta basis industri bernilai tambah berpotensi menciptakan ilusi kemajuan ekonomi**. Tanpa penguatan kelas menengah sebagai aktor ekonomi utama, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan industri yang berorientasi nilai tambah, strategi pertumbuhan berbasis komoditas dan hilirisasi berisiko menjebak perekonomian dalam middle income trap yang berkepanjangan.

Risiko Chilean Paradox menegaskan bahwa **tantangan utama pembangunan Indonesia bukan semata mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi**, melainkan mengonversi momentum pertumbuhan dan

Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: BPS (2025)

bonus demografi yang bersifat sementara menjadi kapasitas ekonomi yang permanen. Ketika pertumbuhan tidak diikuti oleh **penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan basis industri, serta peningkatan ketahanan ekonomi kelas menengah**, maka kenaikan pendapatan agregat berpotensi berhenti sebagai fenomena siklus jangka pendek, bukan sebagai proses transformasi struktural yang berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan fiskal perlu dipahami sebagai instrumen strategis untuk mentransformasikan pertumbuhan jangka pendek menjadi kapasitas jangka panjang. Perpajakan berbasis konsumsi seperti **tidak memiliki potensi untuk memperluas ruang fiskal secara relatif stabil** dan efektivitasnya ditentukan oleh arah dan kualitas penggunaan penerimaan negara. Apabila tambahan penerimaan fiskal tidak diarahkan untuk memperkuat pendidikan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta melindungi daya beli rumah tangga, khususnya kelas menengah, maka kebijakan fiskal justru berisiko memperbesar tekanan ekonomi pada

memperbesar tekanan ekonomi pada kelompok yang masih rentan dan melemahkan fondasi transformasi struktural (ADB, 2025). Keterbatasan tersebut secara langsung **membatasi keberhasilan agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional**. Peningkatan nilai tambah tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses pertumbuhan kumulatif yang bergantung pada kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur industri, serta keberadaan ekosistem pendukung yang mencakup pembiayaan, teknologi, dan kelembagaan yang efektif.

Tanpa kapasitas fiskal yang secara konsisten diarahkan untuk membangun prasyarat tersebut, **strategi hilirisasi cenderung berhenti pada tahap awal dan gagal mendorong penguatan struktur ekonomi rumah tangga**. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa peningkatan pendapatan belum sepenuhnya terkonsolidasi menjadi ketahanan kesejahteraan jangka panjang, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi sulit dikapitalisasi secara berkelanjutan (World Bank, 2024).



Membuka Lapangan Kerja dengan Lompatan Inovasi

Tantangan ketenagakerjaan menjadi salah satu permasalahan yang seringkali terjadi di Indonesia. Di tengah dinamika perekonomian, **isu ketenagakerjaan bukan sekedar pengangguran terbuka, namun juga setengah menganggur (under employment) dan ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan (educated employment)**. Situasi ini menghambat pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal dan berdampak negatif pada perekonomian nasional.

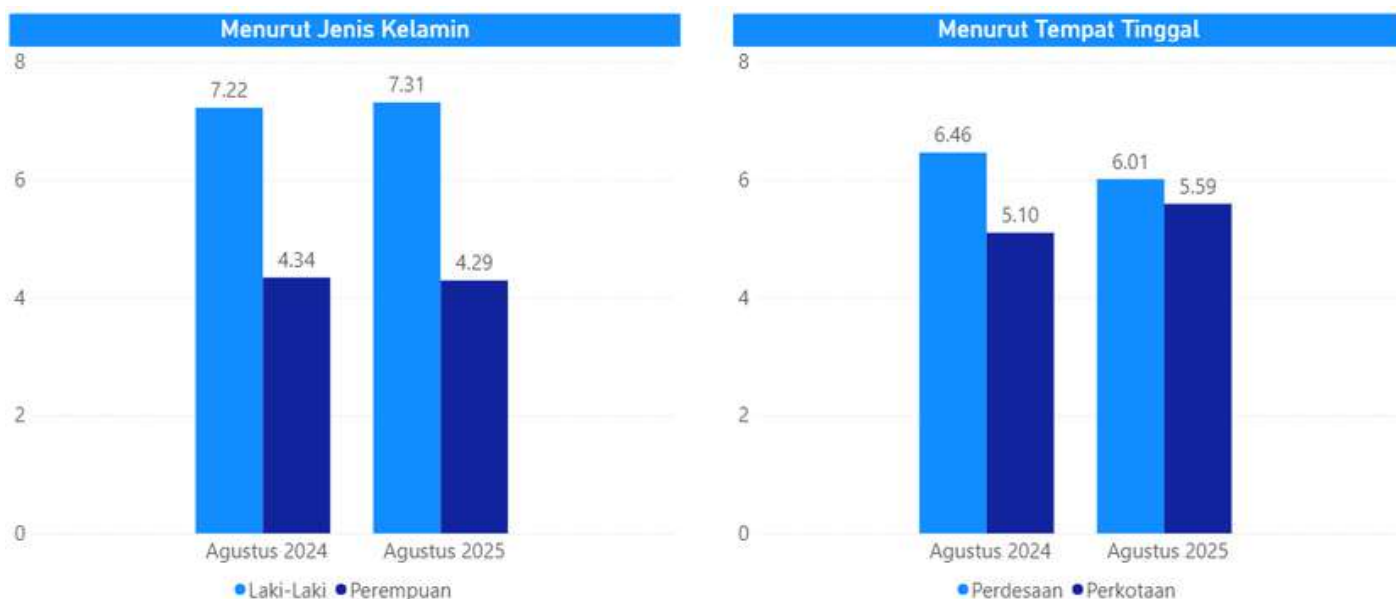
Fenomena setengah menganggur dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka setengah menganggur menggambarkan inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Sebagian besar individu pada situasi ini memiliki jam kerja kurang dari normal dan memperoleh pendapatan yang tidak optimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, **terdapat 11,6 juta penduduk setengah menganggur di Indonesia pada tahun 2025 dan telah meningkat dari tahun sebelumnya**.

Kelompok pria cenderung lebih banyak yang masuk ke dalam kelompok setengah menganggur dan individu yang bertempat tinggal di perdesaan memiliki jumlah penduduk setengah menganggur lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Perubahan ekosistem mendesak tenaga kerja untuk **mengembangkan kemampuan dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan industri**. Transformasi digital memiliki peran krusial dalam menjembatani kapabilitas individu dengan bekerja. Perkembangan teknologi membuka peluang lebih tinggi bagi masyarakat untuk mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, dan melakukan aktivitas lainnya yang memiliki nilai tambah.

Gambar 10. Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (juta), 2024 dan 2025



Sumber: BPS (2025)

Sejauh ini Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong kemajuan tenaga kerja domestik. **Indonesia perlu menciptakan inovasi dan nilai tambah sebagai pendorong ekonomi nasional di tengah ketidakpastian sosial dan ekonomi.** Penyerapan lapangan pekerjaan dan pengembangan teknologi informasi menjadi langkah yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penanaman modal asing ke dalam negeri juga akan membuka berbagai peluang dan menciptakan lapangan pekerjaan secara luas. Strategi pemetaan sektor potensial yang tepat sasaran dapat meningkatkan arus permodalan asing di Indonesia. Penyelenggaraan event berskala internasional menjadi alternatif untuk **menambah pendapatan nasional dan memperluas jangkauan dalam upaya menarik investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri.**

Lapangan Kerja: Dominan Informasi

Perkembangan era digitalisasi menciptakan perubahan pola kehidupan yang mengharuskan rumah tangga untuk melakukan transformasi digital secara signifikan. Fokus utama masyarakat kini **mengalami pergeseran dari hanya kelompok tenaga kerja terampil (white collar) hingga berkembang pesatnya fenomena gig worker (pekerja lepas).**

Digitalisasi menjadi pendorong terbukanya informasi yang lebih mudah di akses oleh masyarakat. Bagi sebagian orang yang mampu beradaptasi dengan teknologi, situasi ini akan sangat menguntungkan bagi mereka. Namun, sebagian orang lainnya yang tidak melakukan upskilling ditengah

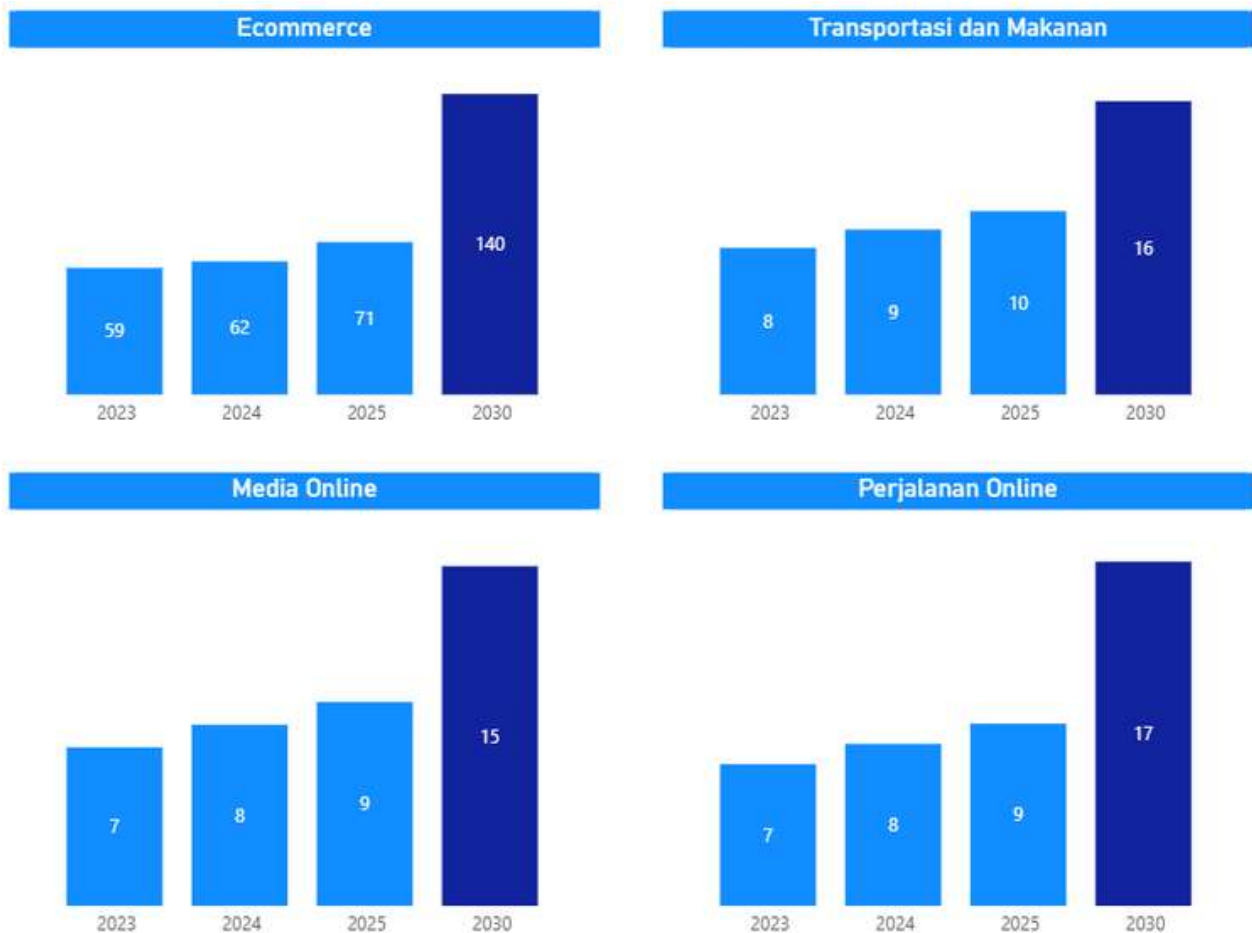
perkembangan digital akan sulit untuk bersaing pada pasar tenaga kerja. **Ketidakstabilan ekonomi memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk meminimalisir pengeluaran berlebihan.** Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dapat mewujudkan pemerataan pendapatan di berbagai daerah.

Perubahan era digital **memunculkan kesempatan bagi tenaga kerja untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan dengan skema remote working.** Melalui skema remote working, individu dapat memperoleh pendapatan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya hidup untuk merantau ke pusat kota. Alternatif ini dapat menjadi salah satu strategi nasional dalam menjaga keseimbangan tenaga kerja di perkotaan dan perdesaan.

Di tengah perkembangan teknologi, pekerja lokal juga menghadapi berbagai tantangan. Kemajuan digitalisasi secara nasional menuntut tenaga kerja untuk melakukan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Untuk menghadapi hal tersebut **Pemerintah perlu memberikan dukungan pelatihan, pengembangan, dan penciptaan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi potensi berdasarkan minat serta kemampuan masing-masing individu.**

Pembekalan tenaga kerja dengan keterampilan di bidang digital akan meminimalisir tergantikannya tenaga kerja lokal dengan teknologi maupun tenaga kerja asing. Disamping itu, peningkatan kemampuan ini juga akan menciptakan pertumbuhan produktivitas masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Gambar 11. Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)



Sumber: e-Conomy SEA 2025, Google, Temasek, Bain (2025)

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan ekonomi digital. Hal tersebut dibuktikan oleh data dari laporan e-Conomy SEA 2025 yang menunjukkan pertumbuhan positif **dari semua kategori baik E-commerce, transportasi dan makanan, media online, maupun perjalanan online.**

Berdasarkan proyeksi tahun 2030, Indonesia akan mengalami lonjakan nilai Gross Merchandise Value (GMV) atau total nilai semua barang yang terjual secara online. Konsistensi dan ekspektasi pertumbuhan ini menjadi potensi yang signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan persentase tahunan mencerminkan tingginya potensi perkembangan ekonomi

digital nasional. Sektor E-commerce menorehkan nilai GMV tertinggi diantara sektor lainnya. Peningkatan sektor digital dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan pemerataan penetrasi internet. Berdasarkan laporan tahunan Komdigi (2024), mendukung percepatan jangkauan internet melalui program dan inisiatif pembangunan infrastruktur digital yang merata. Strategi ini ditunjukkan sebagai Komdigi langkah nasional dalam mengatasi kesenjangan digital diantara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Indonesia memiliki peluang yang tinggi sebagai pemain unggulan pada sektor ekonomi digital Asia Tenggara. Potensi ekonomi digital harus dimanfaatkan dengan

baik melalui pengelolaan sumber daya dan pengaturan regulasi yang efisien. Pertumbuhan industri ini **mendesak kesiapan dalam mengelola sumber daya manusia**. Disamping itu, keamanan menjadi kunci kesuksesan untuk mencapai kemajuan sektor digital dalam jangka panjang. **Kolaborasi Pemerintah dengan swasta** memperkuat fondasi ekonomi digital nasional dan membuka kesempatan lebih tinggi untuk memperoleh dampak ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dukungan ke Sektor Pangan

Sektor pangan menjadi tumpuan utama untuk menjaga ekonomi negara tetap stabil, terutama dalam menjamin kecukupan makanan dan menyediakan lapangan kerja yang luas. Akan tetapi, masalah yang dihadapi sekarang makin rumit, mulai dari kurangnya ketertarikan anak muda pada sektor ini hingga perlunya menaikkan mutu pangan melalui pengolahan lebih lanjut. Dalam rangka menyusun langkah kerja yang efisien, perlu dilakukan kajian secara rinci bagaimana pembagian pekerja di sektor pangan dan seberapa besar hasil kinerjanya agar seluruh tahapan produksi berjalan lancar.

Pemerintah dan stakeholder terkait terus berusaha memperbaiki sektor pangan agar sejalan dengan perkembangan teknologi. Salah satu fokus utamanya adalah memajukan smart farming sebagai daya pikat bagi generasi Z dan kaum milenial. Dengan adanya penerapan teknologi digital pada sektor pangan, diharapkan pandangan masyarakat terhadap sektor ini yang tadinya dianggap kuno dapat berubah

menjadi lebih modern, meningkatkan produktivitas, serta memberikan potensi penghasilan yang lebih menjanjikan bagi tenaga kerja muda yang melek teknologi.

Kebijakan dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia sedang mengalami berbagai perubahan. Saat ini, bukan lagi tentang hasil panen di awal saja yang menjadi perhatian. **Namun Pemerintah lebih fokus pada proses pengolahan hasil setelah panen**. Situasi ini mencerminkan hasil tani yang cenderung tidak dijual mentah lagi guna meminimalisir aktivitas ekspor barang mentah. Pemerintah memiliki dorongan untuk mengkolaborasikan antara pertanian dengan pabrik sebagai alternatif dalam meningkatkan nilai jual barang.

Pembangunan infrastruktur pengolahan bahan mentah akan memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Strategi ini bisa menjadi alternatif untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih kuat. Kolaborasi pabrik pengolahan dengan pertanian dapat memperkuat stabilitas harga bahkan saat harga barang dunia mengalami kenaikan atau penurunan. Ketahanan pangan akan tercapai dalam jangka panjang jika pabrik pengolahan berjalan dengan baik. **Namun, pelaksanaan program harus dilakukan proses monitoring dan evaluasi sehingga dapat meminimalisir risiko kegagalan**.

Transformasi proses pertanian yang tradisional menjadi berbasis teknologi akan memperluas berbagai posisi di pasar tenaga kerja. Peran teknologi juga membantu pengecekan mutu hasil pertanian yang lebih baik dan terjamin.

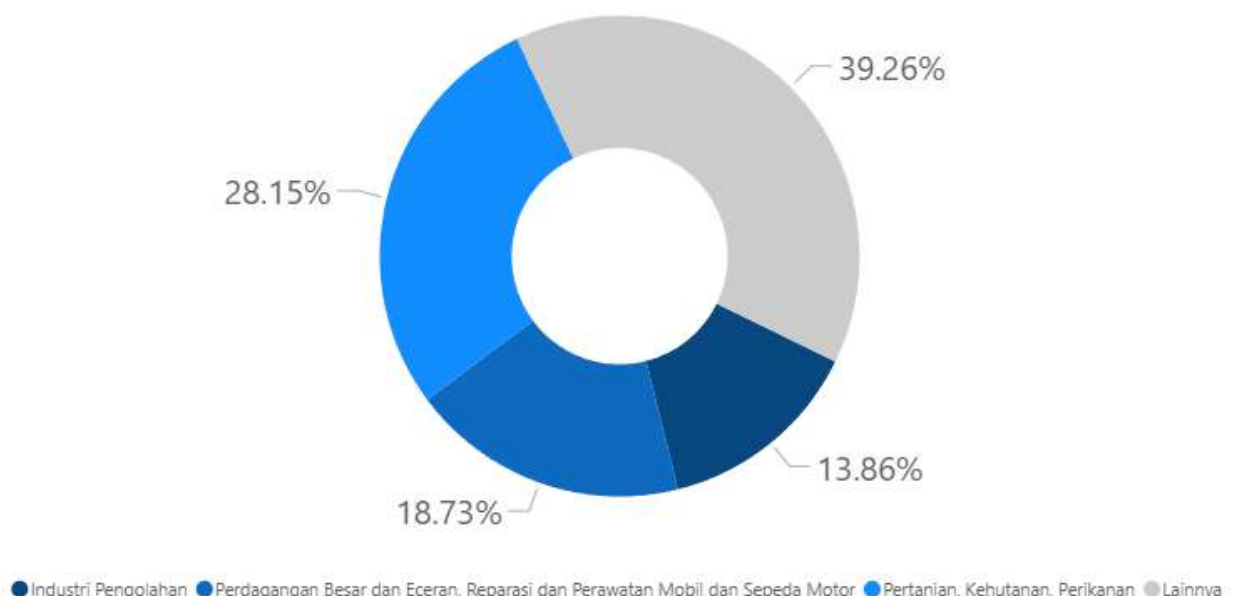
Penciptaan pabrik-pabrik baik di desa maupun kota di berbagai daerah dapat mendukung pemerataan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengembangan sektor pangan di Indonesia berpotensi untuk meningkatkan peluang tenaga kerja dari beragam tingkat pendidikan. Keberhasilan strategi kebijakan pada industri pertanian dapat diterapkan diberbagai industri pangan lainnya termasuk kehutanan, perikanan, pengolahan, dan lain sebagainya.

Sektor pangan merupakan salah satu sektor krusial di Indonesia yang memiliki berbagai subsektor didalamnya dan saling berkaitan satu sama lain. Selaras dengan hal tersebut, Kemensetneg RI (2025) telah menyampaikan prioritas sektor pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai implementasi langsung dari misi Presiden atau Asta Cita. Satu dari delapan Asta Cita tersebut menegaskan bahwa negara mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

bangsa melalui swasembada pangan. **Oleh karena itu, sektor pangan termasuk prioritas nasional yang harus didorong untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menciptakan stabilitas perekonomian.** Data BPS (2025) membuktikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memegang peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan persentase sebesar 28,15 persen dari total penduduk bekerja. Ketiga sektor ini juga termasuk dalam prioritas nasional sebagai sektor primer untuk mendorong tercapainya swasembada pangan. Pemerintah berperan penting untuk menjaga daya serap dan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan.

Kebijakan penguatan lintas sektor perlu dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi pada seluruh aktivitas bisnis. **Hal ini dilakukan dengan mengkolaborasikan sektor primer dan ekosistem industri pengolahan distribusi yang terstruktur.** Dukungan Pemerintah dalam hal

Gambar 12. Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor, Agustus 2025



Sumber: BPS (2025)

pengaturan regulasi juga perlu diperhatikan karena dapat berdampak langsung pada sektor ini. Strategi kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan kemajuan sektor pangan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.

Data BPS (2025) membuktikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memegang peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan persentase sebesar 28,15 persen dari total penduduk bekerja. Ketiga sektor ini juga termasuk dalam prioritas nasional sebagai sektor primer untuk mendorong tercapainya swasembada pangan.

Pemerintah berperan penting untuk menjaga daya serap dan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan.

Kebijakan penguatan lintas sektor perlu dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi pada seluruh aktivitas bisnis. Hal ini dilakukan dengan mengkolaborasikan sektor primer dengan ekosistem industri pengolahan serta distribusi yang terstruktur.

Dukungan Pemerintah dalam hal pengaturan regulasi juga perlu diperhatikan karena dapat berdampak langsung pada sektor ini. **Strategi kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan kemajuan sektor pangan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.**

Reorientasi Peta Industri

Saat ini, struktur ekonomi negara kita berada pada titik yang sangat penting, dimana perlu melakukan perubahan besar-besaran di sektor industri agar tetap kompetitif secara global. Salah satu aspek utama dari perubahan ini adalah fokus

mendalam pada industri-industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Indonesia harus menerapkan strategi efisiensi dengan tepat. Dengan strategi tersebut diharapkan sektor-sektor ini dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaganya tetap stabil dan kuat, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Mempertimbangkan keberlanjutan adalah bagian kunci dalam merencanakan industri di masa depan. **Indonesia perlu segera mengalokasikan lebih banyak dana untuk industri hijau (green industry) dan pengembangan sumber energi terbarukan.** Inovasi ini bukan hanya tentang mengurangi emisi karbon, melainkan menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas di industri teknologi hijau yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk menjaga keselarasan kebijakan, berbagai industri unggulan dikumpulkan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). **Pemerintah berharap dengan menggabungkan berbagai sektor ekonomi ke dalam satu area terintegrasi.**

Hal ini dapat memperlancar logistik, mempermudah regulasi, dan membangun sistem dukungan yang kuat untuk seluruh pihak yang terlibat. Strategi kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan menjangkau lebih banyak investor dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Reorientasi peta industri di Indonesia perlu mempertimbangkan potensi masing-masing sektor dan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sektor dan daerah mana yang memiliki potensi dalam menarik minat investor asing.

Tabel 7. Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)

Sektor Ekonomi (Juta US\$)	Triwulan I-2025	Triwulan II-2025	Triwulan III-2025
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	1,133.99	559.87	764.88
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	284.77	251.94	330.83
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	763.01	619.86	438.04
Pertambangan	1,192.03	1,257.31	1,091.53
Perikanan	4.74	5.83	7.83
Perdagangan dan Reparasi	652.27	490.99	585.91
Listrik, Gas, dan Air	522.66	497.40	404.51
Konstruksi	123.99	61.39	142.23
Kehutanan	34.81	12.52	6.68
Jasa Lainnya	1,080.79	1,111.97	1,179.82
Industri Tekstil	225.23	144.96	192.71
Industri Mineral Non Logam	182.23	157.44	279.31
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	595.26	506.01	520.02
Industri Makanan	611.48	522.80	677.37
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3,643.47	3,644.77	3,503.26
Industri Lainnya	115.30	148.38	128.22
Industri Kimia dan Farmasi	913.72	650.52	1,070.70
Industri Kertas dan Percetakan	668.95	542.97	584.51
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	666.24	447.90	550.27
Industri Kayu	41.02	30.07	28.33
Industri Karet dan Plastik	321.95	356.17	198.65
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	415.99	387.10	315.45
Hotel dan Restoran	204.92	227.26	251.06
Total	14,398.82	12,635.43	13,252.12

Sumber: BPS (2025)

BPS (2025) menunjukkan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya mendominasi realisasi investasi penanaman modal asing di Indonesia sepanjang triwulan-I hingga triwulan-III tahun 2025. Sektor ini menjadi pendorong paling besar investasi asing di Indonesia dengan realisasi rata-rata di atas US\$ 3,5 miliar per kuartal. **Keberhasilan sektor ini membuktikan peta industri nasional lebih memprioritaskan penciptaan nilai tambah tinggi melalui proses pengolahan dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.**

Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi serta Pertambangan juga secara konsisten memperoleh realisasi investasi asing yang relatif tinggi pada setiap kuartal. Meskipun memiliki nominal yang paling kecil diantara sektor lainnya, **sektor perikanan menunjukkan**

pertumbuhan yang konsisten. Seluruh sektor ekonomi harus memperoleh perhatian dan pengembangan sebagai langkah untuk mencapai pertumbuhan investasi yang signifikan meskipun terdapat tantangan domestik maupun global. Pergerakan arus investasi asing di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti **kebijakan domestik, dinamika global, dan fondasi bisnis dari tiap sektor ekonomi.**

Secara keseluruhan, capaian realisasi penanaman modal luar negeri di Indonesia memberikan dorongan yang kuat bagi perekonomian nasional. Selama tahun 2025, total realisasi investasi asing berada pada kisaran US\$ 12,6 miliar – US\$ 14,3 miliar per kuartal. Hal tersebut mencerminkan bahwa potensi industri di Indonesia berpeluang sangat tinggi untuk menciptakan multiplier effect terhadap

perekonomian nasional khususnya penciptaan lapangan pekerjaan. Keberhasilan realisasi investasi ini akan memperbesar potensi penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan di berbagai daerah.

Strategi Eventonomics

Visi nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 didukung oleh 8 misi Asta Cita, salah satunya dengan **meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur**. Ekonomi kreatif (EKRAF) termasuk ke dalam 17 Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pengembangan EKRAF di Indonesia memerlukan strategi yang efektif agar selaras dengan tren global sehingga memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait. LPEM FEB UI (2023) menjelaskan bahwa **ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas** karena keunikannya yang fokus pada ide serta tidak terikat pada usia, gender, tingkat pendapatan, letak geografis, maupun skala usaha.

Strategi Eventonomics merupakan salah satu bagian dari ekonomi kreatif dengan tujuan untuk membangun ekosistem yang melibatkan berbagai sektor melalui pendekatan acara (event). Konsep ini mengedepankan penciptaan dampak ekonomi dengan mendorong usaha lokal dan mengintegrasikan usaha tersebut pada ekosistem bisnis yang terstruktur. **Eventonomics muncul untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja**. Strategi ini

umumnya dilakukan dengan mengadakan acara atau festival di berbagai daerah sebagai alternatif pemerataan ekonomi nasional.

Pengadaan acara atau event seringkali membawa dampak yang signifikan untuk menjangkau konsumen dan memperluas jaringan pemasaran bagi usaha lokal. Jenis event yang dilaksanakan di Indonesia terdiri umumnya berupa MICE (Meetings Incentives, Conference, and Exhibition). MICE menjadi segmen penting bagi berbagai industri domestik salah satunya industri pariwisata. **Dengan dilaksanakannya event berskala besar, banyak perusahaan yang memperoleh dampak ekonomi seperti transportasi, perhotelan, destinasi wisata, hingga kuliner.**

Inovasi eventonomics perlu menjadi perhatian Pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan cara menentukan kebijakan dan regulasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder diarahkan untuk mendorong pelaksanaan event besar sebagai langkah menciptakan ekonomi nasional yang inklusif.

Pengembangan industri di Indonesia bukan hanya fokus pada strategi membangun internal perusahaan, namun juga langkah perluasan jangkauan eksternal yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan berbasis acara atau event. Laporan Indonesia Tourism Outlook 2025/2026 menyebutkan tiga strategi penyelenggaraan event berkualitas. Implementasi MICE dengan standar teknis yang ketat akan mendukung pertumbuhan industri secara signifikan.

Gambar 13. Strategi Penyelenggaraan Event Berkualitas



Sumber: *Indonesia Tourism Outlook 2025/2026*, Bank Indonesia, Kemenparekraf, Bappenas

Fokus saat ini adalah menerapkan event dengan prinsip berkelanjutan yang mengarah pada standar ramah lingkungan serta memanfaatkan digitalisasi untuk menjangkau peserta dan meningkatkan efisiensi operasional. Disamping itu, kemudahan dan transparansi perizinan dapat didukung dengan penggunaan sistem digital Online Single Submission (OSS) sebagai langkah mempermudah industri event mengurus operasional perizinan.

Keberhasilan penyelenggaraan event di Indonesia dapat dilihat hasilnya dari adanya acara MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kontribusi event ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai

pada kisaran angka Rp4,3 Triliun – Rp4,8 Triliun. Penghasilan ini menjadi bukti bahwa event MotoGP Mandalika bukan hanya sekadar event olahraga, melainkan aktivitas ekonomi yang secara signifikan menggerakkan perekonomian daerah.

Saat ini, NTB telah terkenal di mata dunia memiliki destinasi wisata yang berkualitas karena pengunjung dari mancanegara yang mengikuti event MotoGP juga merasakan indahnya wisata daerah dekat lokasi tersebut. NTB memperoleh banyak efek domino dari event ini seperti **penyerapan tenaga kerja, arus masuk investasi, pemamabangunan infrastruktur, hingga peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.**

UMKM sebagai *Backbone* Perekonomian: Perlu Waspada

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan penting sebagai **pilar utama ekonomi Indonesia**, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja yang besar serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, posisi penting ini perlu diimbangi dengan kewaspadaan yang tinggi mengingat persaingan pasar global yang semakin ketat.

Saat ini, **kontribusi UMKM Indonesia dalam rantai nilai global (Global Value Chain) masih tergolong rendah**. Hal ini menunjukkan bahwa produk lokal mengalami kesulitan untuk memasuki dan bersaing secara konsisten di pasar global.

Selain permasalahan jangkauan pasar, tantangan internal yang mendesak adalah **rendahnya penerapan teknologi dan keterbatasan kualitas produksi**. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kesenjangan ini bisa menjadi "bom waktu"

bagi ketahanan ekonomi nasional pada tahun 2026. **Ketidakefisienan yang disebabkan oleh metode produksi tradisional menimbulkan kerentanan UMKM terhadap guncangan ekonomi**. Oleh karena itu, diperlukan modernisasi melalui digitalisasi agar sektor ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang di pasar global.

Kondisi ini diperburuk oleh **struktur usaha di Indonesia yang menunjukkan ketimpangan yang nyata**. Walaupun jumlah unit usaha UMKM sangat besar, namun Indonesia masih kekurangan usaha kelas menengah yang tangguh dan bersaing. Padahal, **usaha kelas menengah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi**. Tanpa adanya pertumbuhan kelas menengah yang sehat, struktur ekonomi nasional menjadi rentan karena terlalu bergantung pada sektor mikro yang memiliki daya tahan terbatas terhadap krisis.

Gambar 14. Profil UMKM Indonesia



Sumber: Kementerian UMKM RI (2024)

Data dari Kementerian UMKM RI per Desember 2024 menguatkan argumen tentang penguasaan sektor mikro. Dari total seluruh unit usaha UMKM di Indonesia, sebagian besar tergolong sebagai usaha mikro. Sementara itu, **usaha kecil hanya ada 0,24% dan usaha menengah sebesar 0,05% dari total keseluruhan unit usaha.** Fenomena ini menunjukkan ketimpangan yang besar. Ketidaksetaraan jumlah ini mencerminkan banyak pelaku ekonomi kita masih berada pada **tingkat subsisten dengan skala produksi kecil.**

Meskipun usaha mikro berukuran kecil, pengaruh sosialnya pada penyediaan lapangan kerja sangat signifikan. Hal tersebut dibuktikan bahwa sektor-sektor ini dapat menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja dengan total lebih dari 29 juta pengusaha. Ketergantungan jutaan orang Indonesia pada sektor mikro ini menunjukkan pentingnya stabilitas UMKM sebagai indikator utama kesehatan perekonomian nasional. **Angka ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada UMKM akan langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara nasional.**

Kebutuhan untuk memperkuat UMKM kini semakin penting, terutama dengan proyeksi ekonomi global yang tidak begitu baik. Dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis oleh IMF pada Oktober 2025, diperkirakan bahwa ekonomi dunia akan melambat pada tahun 2026 dengan pertumbuhan hanya mencapai 3,1%.

Situasi ini juga memengaruhi kawasan ASEAN-5, termasuk Indonesia, yang diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1%. Melambatnya ekonomi global ini tentu akan

memengaruhi tingkat daya beli dan permintaan ekspor yang selama ini menjadi pilar utama ekonomi.

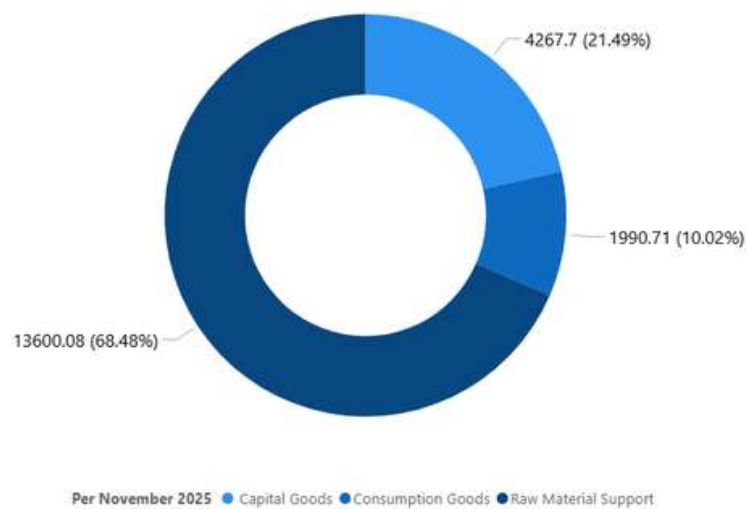
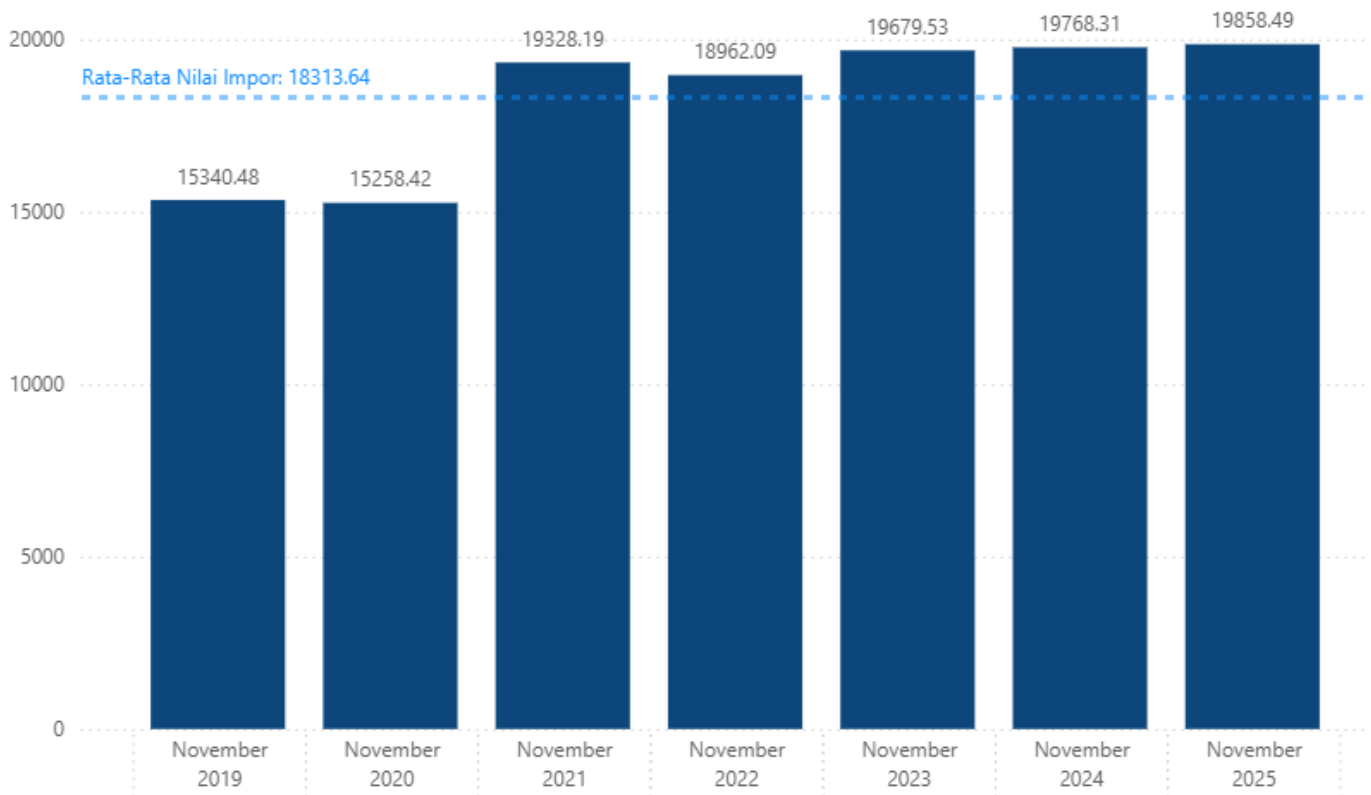
UMKM GVC: UMKM *Backbone* Justru Bahaya

Ekonomi Indonesia sangat tergantung pada UMKM sebagai pilar utama negara. Namun, ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko besar jika tidak disertai dengan peningkatan efisiensi. **Usaha yang tidak terukur dan kurang efisien dapat menyebabkan kerentanan dalam sistem yang membuat stabilitas ekonomi nasional rentan terhadap perubahan kecil di tingkat mikro.** Jika tidak ada standar dan ukuran kinerja yang jelas, sektor ini bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan dalam berinovasi dan melakukan efisiensi di tengah perubahan industri yang berlangsung dengan cepat. **Terbatasnya modal dan kurangnya akses terhadap teknologi mutakhir** membuat banyak pengusaha terjebak dalam metode produksi tradisional. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam bergabung dengan rantai pasokan modern, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau pasar internasional.

Dominasi impor bahan baku juga menjadi kendala besar bagi UMKM dan industri kecil untuk tumbuh. **Saat harga bahan mentah internasional naik, maka biaya produksi di dalam negeri otomatis akan meningkat.** Kemudian, pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang bagi konsumen dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar domestik.

Gambar 15. Perkembangan Nilai Impor di Indonesia (Juta US\$)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian

Ketergantungan yang sangat besar pada produk impor untuk bahan baku menunjukkan **lemahnya industri hulu kita yang belum bisa memenuhi kebutuhan produksi lokal secara mandiri**. Berdasarkan data dari BPS, bahan baku dari luar negeri menyumbang impor terbesar bagi Indonesia

dengan proporsi sebesar 68,48% dari keseluruhan impor. Situasi ini menyebabkan **industri dalam negeri sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar rupiah dan masalah dalam rantai pasokan global**. Sehingga, Pemerintah perlu melindungi dan memperkuat produksi dalam negeri.

dan Badan Pusat Statistik (2023) Berdasarkan data pada Gambar 16, perkembangan ekspor UMKM menunjukkan pergerakan yang tidak konsisten, meskipun cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2019. Pada tahun 2017, nilai ekspor tercatat mencapai Rp301.630 miliar, dengan kontribusi sebesar 14,50% terhadap ekspor nasional secara keseluruhan. Namun, pada tahun 2018, angka tersebut mengalami penurunan menjadi Rp293.841 miliar, disertai dengan kontribusi yang berkurang sedikit ke level 14,40%.

Meskipun terjadi penurunan, sektor ini menunjukkan pemulihan yang signifikan pada tahun 2019, dengan nilai ekspor melonjak hingga mencapai Rp339.191 miliar. Peningkatan ini juga diiringi oleh kenaikan proporsi kontribusi ekspor UMKM terhadap total nilai ekspor nasional menjadi 15,70%. Tren positif ini mengindikasikan bahwa **meskipun menghadapi sejumlah tantangan dalam inovasi, UMKM memiliki potensi yang besar jika didukung dengan kebijakan tepat.**

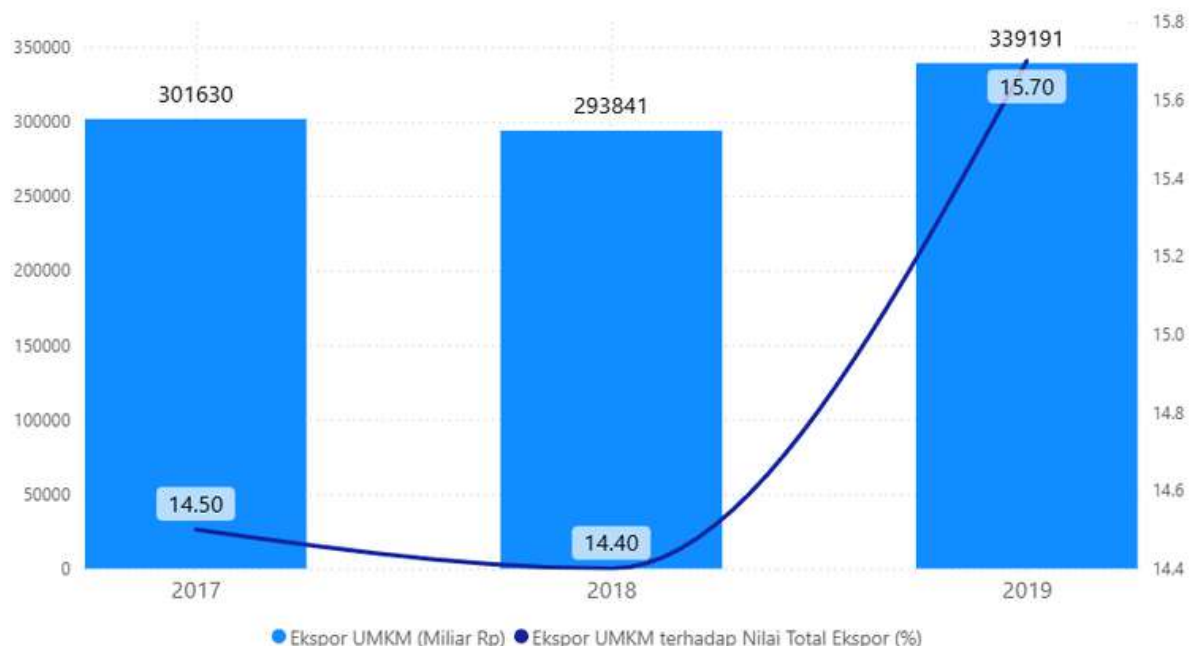
PPH Final UMKM 0,5% merupakan *Policy Politis*

Implementasi skema PPh Final 0,5% untuk UMKM sering kali dilihat dari dua perspektif yang bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini berfungsi sebagai insentif pajak untuk mengurangi beban administrasi pajak. Di sisi lain, muncul pertanyaan apakah insentif ini benar-benar dapat membantu UMKM untuk berkembang, atau malah menjadi alat untuk mengendalikan ketegangan sosial.

Dengan tarif yang sangat rendah dan kemudahan dalam pelaporan, pemerintah berhasil menciptakan dukungan bagi masyarakat kecil. Namun, jika diteliti lebih lanjut, kemudahan ini tidak diiringi dengan dukungan produktivitas yang memadai, sehingga peran pajak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terdistorsi oleh kepentingan stabilitas jangka pendek.

Dampak paling mengkhawatirkan dari kebijakan adalah munculnya fenomena

Gambar 16. Perkembangan Ekspor UMKM



Sumber: ADB Asia SME Monitor 2023 database, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Pusat Statistik (2023)

ketidakmauan untuk berkembang, yang dikenal sebagai "Threshold Effect". Pelaku UMKM sering merasa lebih baik tetap di bawah batas omzet tertentu **demi mempertahankan tarif pajak rendah sebesar 0,5%** . Keadaan ini menciptakan kendala psikologis dan operasional bagi usaha kecil yang ingin tumbuh, karena pertumbuhan usaha berarti mereka akan beralih ke skema pajak normal yang dianggap lebih rumit dan memberatkan. **Akibat dari situasi ini menyebabkan stagnasi dalam basis perpajakan nasional.** Meskipun jumlah pelaku UMKM sangat banyak, kontribusi mereka terhadap pendapatan negara tetap rendah karena tarif yang tetap dan banyaknya usaha yang memilih untuk "bermain aman" di level kecil.

Gambar 17. Perbandingan UMKM Setor PPh Final dengan Total UMKM Wajib Pajak



Sumber: Direktorat Jendel Pajak (DJP), Kemenkeu (2024)

Terdapat ketimpangan mencolok antara jumlah Wajib Pajak UMKM (WP UMKM) yang terdaftar dan yang telah melakukan pembayaran pajak. **Dari total 1,6 juta UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, hanya sekitar 653 ribu unit usaha yang melaksanakan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Final.** Hal ini menandakan bahwa kepatuhan pajak secara mandiri tetap menjadi masalah besar, meskipun tarif yang ditawarkan

sangat rendah. Di sisi lain, angka yang jauh lebih besar terlihat pada pelanggaran kepatuhan, **dengan lebih dari 900 ribu WP UMKM yang belum melakukan penyetoran pajak.** Situasi ini semakin memperkuat pandangan bahwa insentif pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran akan perpajakan. **Jika sebagian besar pelaku usaha masih enggan berkontribusi meskipun tarifnya hanya 0,5%, maka perlu dipertanyakan efektivitas kebijakan ini sebagai sarana untuk redistribusi kekayaan.**

Transformasi UMKM seharusnya tidak hanya bergantung pada insentif pajak. Reformasi dalam birokrasi serta peningkatan pendidikan secara masif diperlukan agar UMKM tidak hanya terjebak dalam "zona nyaman" dengan pajak yang rendah, melainkan juga benar-benar bertransformasi menjadi fondasi ekonomi yang kuat dan taat pada hukum. Hal ini penting untuk memperluas basis perpajakan nasional yang berkelanjutan.

Rasio Saat ini GVC Indonesia dibanding Negara G20 dan ASEAN

Posisi Indonesia dalam rangkaian *Global Value Chain* (GVC) dapat diketahui dengan melihat perbandingan *Foreign Value Added* (FVA) terhadap total ekspor. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari produk ekspor suatu negara yang berasal dari impor atau nilai tambah asing.

Memahami data ini sangat penting untuk menilai seberapa jauh integrasi industri lokal ke dalam pasar global dan seberapa besar ketergantungan industri domestik terhadap bahan baku luar negeri. Secara historis, tren Indonesia menunjukkan stabilitas yang cukup, namun terdapat perbedaan yang mencolok jika

dibandingkan dengan rata-rata negara sekitarnya. Ketika dibandingkan dengan kelompok ekonomi lainnya, posisi Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. **Indonesia berada di posisi menengah, lebih baik dibandingkan rata-rata negara G20, tetapi secara substansial tertinggal di bawah rata-rata negara-negara ASEAN.**

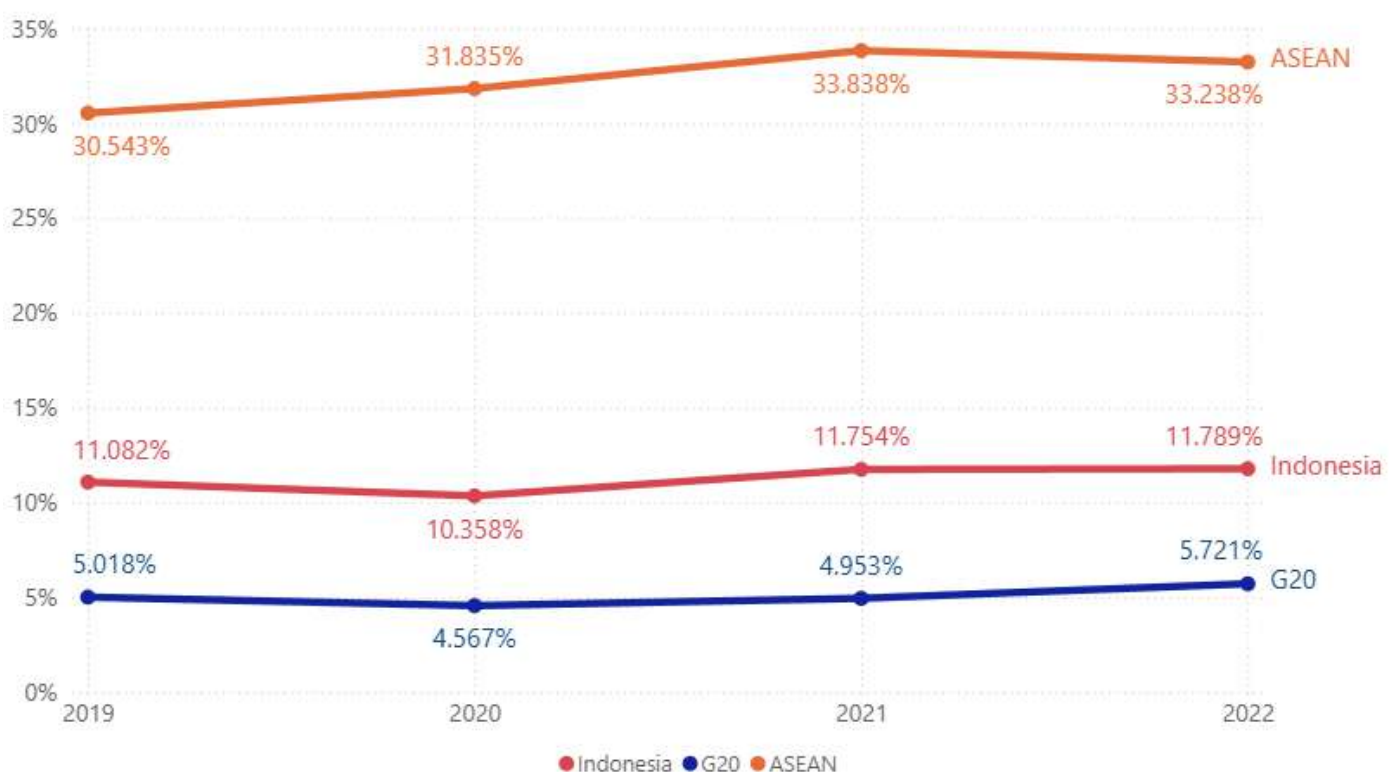
Angka tinggi di kawasan ASEAN mengindikasikan integrasi sektor manufaktur yang sangat kuat, di mana komponen produk sering berpindah antar negara sebelum diekspor ke luar wilayah tersebut. Di sisi lain, rendahnya rasio G20 menunjukkan bahwa negara-negara maju dan ekonomi besar umumnya memiliki basis industri domestik yang kuat atau lebih banyak mengirimkan produk dengan nilai tambah yang tinggi dari dalam negeri.

Rasio FVA Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 11,79%, menunjukkan peningkatan kecil dibandingkan dengan angka 11,08% yang dicapai pada tahun 2019.

Tren ini mengisyaratkan bahwa Indonesia perlahan-lahan mulai memperbaiki keterlibatannya dalam rantai pasokan global setelah mengalami penurunan menjadi 10,358% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi. **Meskipun ada peningkatan, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata ASEAN yang mencapai 33,24% pada periode yang sama.**

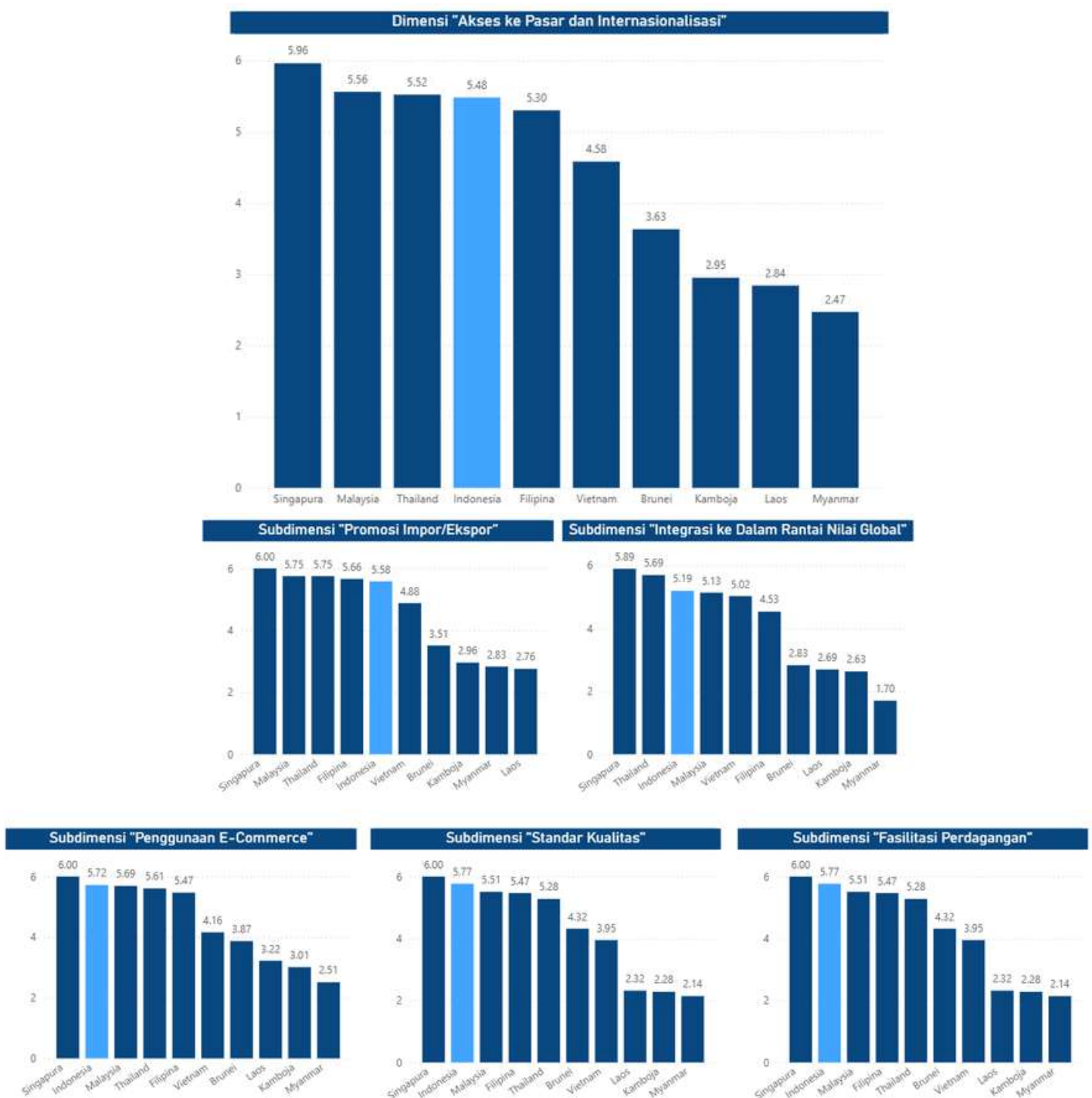
Kesenjangan hampir tiga kali lipat dengan rata-rata ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi industrinya dalam rantai nilai global.

Gambar 18. Perkembangan *Foreign Value Added* Ekspor Bruto (Persen)



Sumber: OECD (2025)

Gambar 19. Skor Indeks Kebijakan UKM ASEAN 2024
Berdasarkan Dimensi Akses ke Pasar dan Internasionalisasi (Persen)



Sumber: ERIA, OECD (2024)

Di sisi lain, kenyataan bahwa rasio Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok G20 menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung secara signifikan pada bahan baku atau komponen impor dalam ekspor dibandingkan dengan negara-negara ekonomi utama lainnya.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah bagaimana Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dari dalam negeri tanpa mengorbankan daya saingnya dalam ekosistem produksi global yang semakin terintegrasi. Kebijakan UKM Indonesia menunjukkan kekuatan akses pasar dan

internasionalisasi yang signifikan di kawasan ASEAN dengan skor 5,48%. Hal ini didukung oleh adopsi e-commerce, standar kualitas, dan fasilitasi perdagangan yang memperoleh peringkat kedua tertinggi.

Namun, kebijakan promosi impor/ekspor dan integrasi ke dalam rantai nilai global masih perlu ditingkatkan. **Oleh karena itu, penguatan sinkronisasi kebijakan sangat diperlukan agar UKM dapat bersaing di tingkat internasional dengan lebih efektif.**

Strategi China & Thailand Mendorong GVC

Dalam usaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat internasional, perhatian terhadap integrasi dalam *Global Value Chain* (GVC) menjadi sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu cara utama yang ditempuh adalah dengan memperkuat keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mereka tidak hanya beroperasi di pasar lokal, tapi juga menjadi bagian yang esensial dalam produksi global.

Pengalaman dua negara ekonomi kuat di Asia, yakni China dan Thailand, menunjukkan bahwa dukungan yang terstruktur untuk UMKM dapat mempercepat posisi negara dalam jaringan nilai global. **Secara spesifik, China menerapkan strategi kluster industri, di mana UMKM kecil diarahkan untuk menjadi penyedia khusus bagi pabrik-pabrik besar.** Pendekatan ini membangun ekosistem efektif, memungkinkan perusahaan besar mendapatkan pasokan konsisten, sementara UMKM mendapatkan jaminan akses pasar dan transfer teknologi.

Di sisi lain, Thailand berhasil menempatkan dirinya sebagai **pusat otomotif Asia Tenggara** dengan mendorong UMKM lokal naik kelas menjadi pemasok Tier-2 atau Tier-3 bagi merek otomotif internasional. Keberhasilan kedua negara tersebut menekankan pentingnya memberikan insentif UMKM untuk mengimplementasikan standarisasi serta sertifikasi internasional agar memenuhi kualifikasi dalam rantai pasokan global.

Gambar 20. Strategi China & Tailan Mendorong GVC



Sumber: ASEAN-Japan Centre (2019) & UNCTAD (2021)

Strategi yang diterapkan oleh China difokuskan pada perluasan serta peningkatan nilai tambah. **Melalui proyek ambisius yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI), negara ini berusaha untuk mengamankan serta memperluas jaringan pasokan mereka ke berbagai bagian dunia.** Selain fokus pada ekspansi fisik, pemerintah China juga berusaha mendorong peralihan industri dari kegiatan yang memiliki nilai rendah ke kegiatan yang memiliki nilai tinggi. **Ini didukung oleh pengintegrasian investasi asing dan penguatan kerja sama dalam produksi internasional untuk mempertahankan posisi dominan China di pasar global.**

Di sisi lain, Tailan mengambil pendekatan yang sangat terarah pada **menarik Foreign Direct Investment (FDI) serta pengembangan kluster industri strategis.** Dengan mendatangkan investor asing, Tailan menciptakan kesempatan industri dalam negeri agar dapat melakukan peningkatan melalui keterlibatan dalam aktivitas dengan nilai tambah tinggi dalam GVC. **Pendekatan ini diperkuat dengan peningkatan konektivitas dan integrasi regional, yang memfasilitasi arus barang, jasa, dan modal agar dapat bergerak lebih lancar di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.**

Keberhasilan untuk memasuki GVC bergantung pada **sinergi antara kebijakan makro yang diterapkan Pemerintah dan kesiapan teknis dari para pelaku usaha di tingkat mikro.** Penerapan standar internasional menjadi hal yang penting agar UMKM lokal dapat berperan aktif di kancah global. **Strategi dengan menekankan peningkatan nilai tambah dan memperkuat konektivitas regional menjadi keharusan demi menjaga keberlanjutan ekonomi di masa mendatang.**

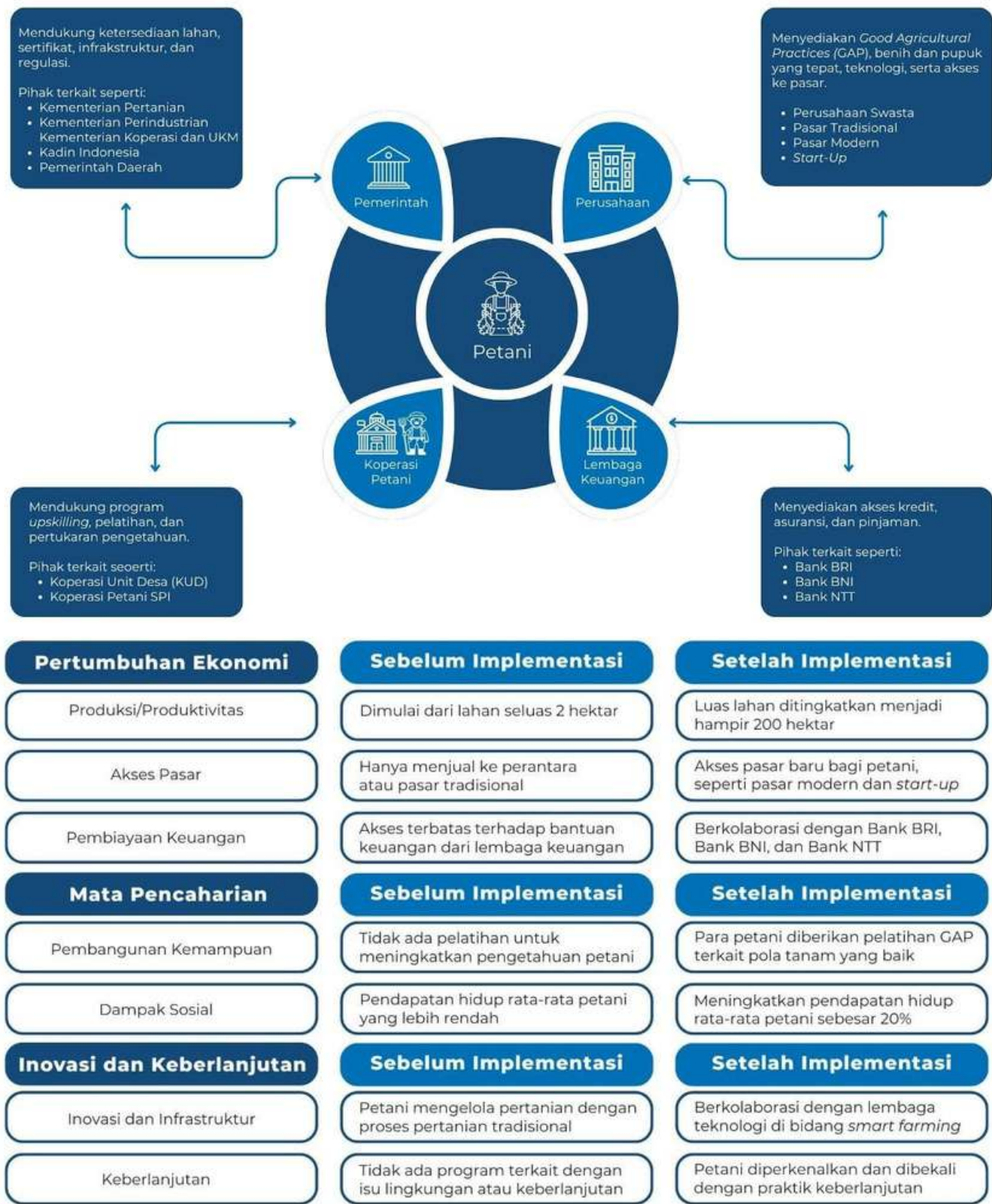
Inclusive Close Loop

Model ekosistem *Inclusive Closed Loop* adalah inovasi bagi UMKM dengan jaringan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan usaha besar. Dalam struktur ini, peran UMKM bukan lagi dilakukan secara individu, tetapi dengan **dukungan dari empat pilar utama: Pemerintah, sektor swasta (perusahaan), lembaga keuangan, dan perusahaan input.** Kolaborasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan klasik yang dihadapi dalam pertanian, seperti keterbatasan akses pada modal, rendahnya adopsi teknologi, hingga ketidakpastian harga di pasar.

Setiap elemen dalam kemitraan ini memberikan kontribusi yang penting dan spesifik. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi dan infrastruktur lahan, sedangkan sektor swasta menawarkan produk berkualitas, serta bimbingan teknis. Di sisi lain, lembaga perbankan berperan dalam memastikan akses kredit yang terjangkau, sementara koperasi fokus pada peningkatan kemampuan serta pertukaran pengetahuan di antara petani. Dengan adanya ekosistem *Inclusive Closed Loop*, jaminan pasar untuk hasil panen petani menjadi lebih terjamin.



Gambar 21. Ekosistem dan Dampak Implementasi Inclusive Closed Loop pada Komoditas Cabai



Sumber: Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro)

Meritokrasi dan Penciptaan Generasi Emas

Di banyak negara, “bonus demografi” sering diperlakukan **sebagai kabar baik yang seolah-olah datang otomatis dimana jumlah penduduk usia produktif membesar**. Banyak yang bilang ekonomi tinggal “menyalakan mesin”, lalu pertumbuhan akan mengikuti, **namun sejarah pembangunan memberi pelajaran yang lebih keras bahwa demografi hanya menyediakan jendela peluang**. Siapa yang menentukan apakah peluang itu menjadi “generasi emas” atau sekadar ledakan jumlah angkatan kerja dengan upah rendah adalah kapasitas ilmiah bangsa yakni kemampuan sistem pendidikan tinggi untuk memproduksi pengetahuan, menumbuhkan talenta STEM, dan membangun etos meritokrasi yang mampu mengalokasikan peluang berdasarkan kualitas, bukan kedekatan.

Dalam kerangka ekonomi pendidikan, proyek generasi emas semestinya dibaca sebagai pembentukan scientific capital nasional yaitu akumulasi keterampilan kognitif tinggi, kultur riset, jejaring akademik global, dan institusi yang mengonversi pendidikan menjadi produktivitas berbasis teknologi. Saat sebuah bangsa gagal membangun scientific capital, maka partisipasi kuliah dapat berubah menjadi inflasi kredensial dimana jumlah gelar naik, tetapi kapasitas inovasi mengalami stagnasi. **Ini bukan sekadar problem kurikulum tapi ini problem desain institusi, insentif, dan rules of the game dalam pasar talenta.**

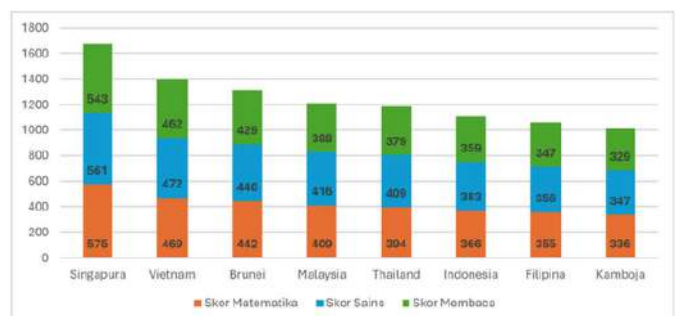
Secara global, hubungan antara pendidikan tinggi dan daya saing kini semakin bersifat “ilmiah”, bukan “administratif”. Negara yang unggul bukan semata yang memperluas

akses, melainkan yang membangun rantai nilai pengetahuan dari laboratorium, publikasi bereputasi, hak paten, deep tech entrepreneurship, hingga produktivitas industri.

Beberapa lembaga World Economic Forum (WEF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan World Bank dalam berbagai publikasinya menegaskan bahwa **pertumbuhan jangka panjang makin ditentukan oleh inovasi (innovation driven growth) dan kualitas sumber daya manusia berkeahlian tinggi (high skill man power), bukan hanya akumulasi modal fisik (capital intensive)**. Dalam ekonomi modern, universitas bukan sekadar penyedia layanan sosial, tetapi mesin produksi pengetahuan dan kredibilitas institusional.

Oleh karena itu, **memperluas akses pendidikan tinggi tanpa memperkuat fondasi pembelajaran pra-perguruan tinggi berisiko melahirkan ekspansi gelar tanpa kenaikan kapasitas inovasi**. Gambar 22 berikut menunjukkan skor PISA, yang membantu membaca apakah sebuah negara memiliki basis literasi-numerasi yang cukup untuk menopang agenda innovation-driven growth.

Gambar 22. Skor PISA Beberapa Negara



Sumber: BPS (2025)

Gambar 22 memperlihatkan bahwa **negara-negara dengan performa PISA yang relatif rendah menghadapi tantangan struktural dalam membangun basis literasi dan numerasi yang memadai**. Bahwa kebijakan pendidikan yang menitikberatkan pada kuantitas akses pendidikan tinggi, tanpa penguatan kualitas pembelajaran pra-perguruan tinggi, berisiko menciptakan ilusi peningkatan human capital.

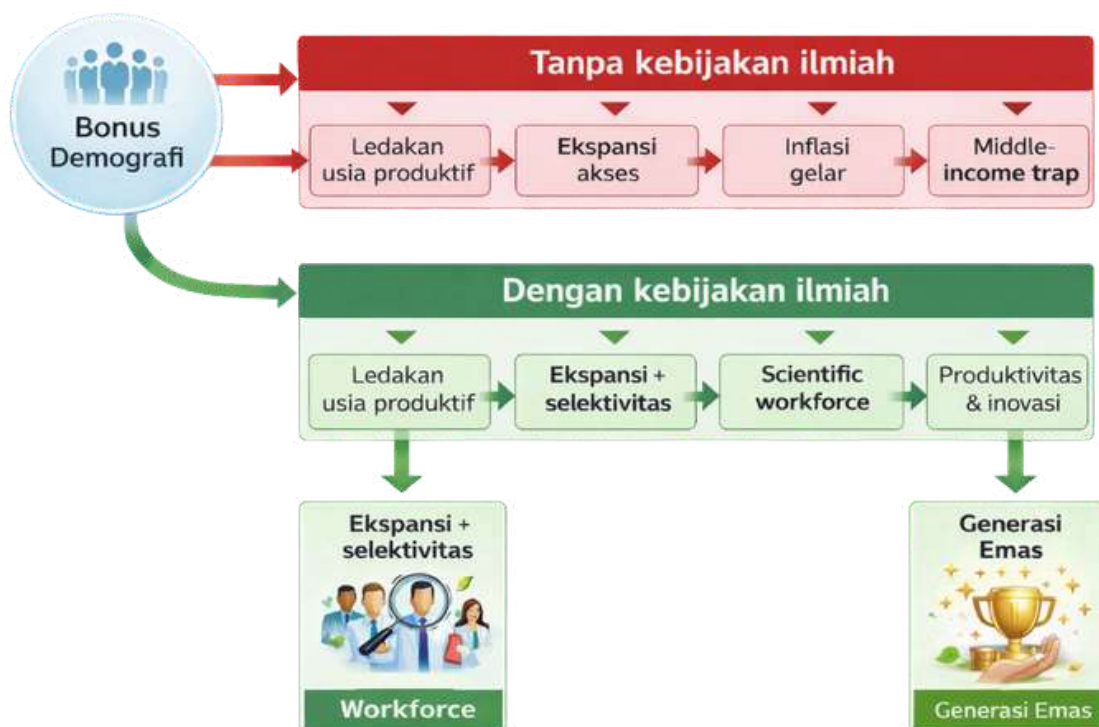
Di titik ini, **meritokrasi menjadi jantung sistem**. Meritokrasi bukan slogan moral tapi mekanisme alokasi yang mengurangi misallocation of talent. Jika rekrutmen dosen, promosi akademik, dan pendanaan riset tidak transparan dan tidak berbasis kinerja, maka biaya ekonomi yang akan muncul seperti publikasi dengan dampak rendah (paper based), reputasi internasional stagnan, hingga talenta terbaik memilih keluar sistem baik keluar negeri maupun keluar dari jalur akademik.

Dengan demikian, pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah Indonesia memiliki **bonus demografi**, melainkan apakah **sistem pendidikan tinggi dan riset mampu mengonversi surplus demografis tersebut menjadi kapasitas ilmiah yang produktif**.

Relasi kausal inilah yang menentukan apakah bonus demografi berfungsi sebagai akselerator pembangunan berbasis pengetahuan atau justru terperangkap sebagai ekspansi pendidikan tanpa hasil. Skema konseptual hubungan tersebut ditunjukkan pada Gambar 23.

Relasi antara bonus demografi, pendidikan tinggi, dan hasil pembangunan ini digambarkan secara konseptual dalam Gambar 23, tanpa kebijakan ilmiah yakni Selektivitas akademik, kualitas dosen, dan pilihan orientasi riset pendidikan tinggi cenderung berujung pada **inflasi gelar dan stagnasi produktivitas**.

Gambar 23. Bonus Demografi Tidak Otomatis: Dari Struktur Penduduk ke Kapasitas Ilmiah



Sumber: OCE (2025)

Sebaliknya, ketika gambar di atas menunjukkan bonus demografi dihubungkan dengan kapasitas ilmiah, hasil akhirnya adalah **scientific workforce dan inovasi yang menopang daya saing jangka panjang**. Implikasi strategisnya jelas bahwa generasi emas adalah instrumen ilmiah dan institusional, bukan sekadar peristiwa demografis. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, **generasi emas adalah proyek akumulasi scientific capital dimana ada kualitas talenta STEM, produktivitas riset, jejaring akademik global, dan mekanisme alokasi peluang berbasis meritokrasi**. Tanpa fondasi ini, pendidikan tinggi berisiko menjadi instrumen sosial semata tetapi tidak cukup untuk membangun peradaban berbasis ilmu pengetahuan.

Dalam ekonomi global, keunggulan bangsa semakin ditentukan oleh kapasitas inovasi. World Economic Forum dalam laporan The future of jobs report tahun 2023 menegaskan bahwa pertumbuhan jangka panjang kini bergantung pada kualitas sumber daya manusia berkeahlian tinggi, bukan hanya pada tingkat partisipasi pendidikan. Universitas tidak lagi berfungsi terutama sebagai penyedia layanan sosial, melainkan sebagai **simpul strategis dalam rantai nilai pengetahuan menghubungkan riset dasar, teknologi terapan, dan produktivitas industri**.

Pada sistem pendidikan tinggi yang matang, **meritokrasi adalah mekanisme utama alokasi sumber daya**. Rekrutmen dosen, pendanaan riset, dan promosi akademik dilakukan melalui kompetisi terbuka berbasis rekam jejak ilmiah. Ketika meritokrasi bekerja, talenta ditempatkan secara optimal, ketika melemah terjadi misallocation of talent yang mahal secara ekonomi.

Kondisi Indonesia: Rendahnya Lulusan STEM dan *Scientific Workforce*

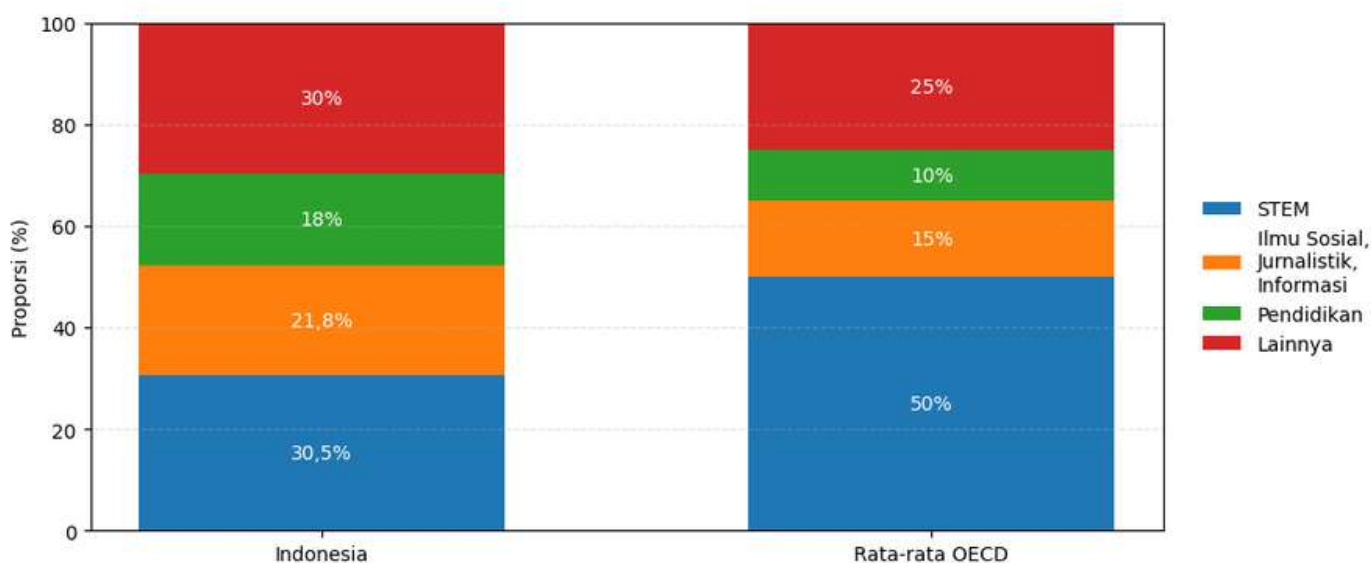
Indonesia telah memperluas akses pendidikan tinggi secara signifikan, tetapi **kapasitas ilmiahnya tertahan oleh keterbatasan struktural dan administratif**.

Salah satu indikator paling krusial adalah rasio mahasiswa–dosen, **di mana sekitar 7,24 juta mahasiswa dilayani oleh 286,7 ribu dosen, sehingga secara nasional satu dosen rata-rata menghadapi sekitar 25 mahasiswa** (Kemdikristek, 2025). **Angka ini jauh di atas rata-rata negara OECD, di mana rasio mahasiswa–dosen berada pada kisaran 14,5**, yang memungkinkan pembelajaran lebih intensif, pembimbingan riset yang memadai, dan pengembangan pendidikan doktoral yang berkelanjutan.

Dengan jumlah mahasiswa saat ini, mencapai rasio setara OECD berarti Indonesia memerlukan sekitar 500 ribu dosen, atau tambahan lebih dari 210 ribu dosen baru dibandingkan kapasitas yang ada saat ini. Keterbatasan kapasitas ini diperparah oleh komposisi lulusan berdasarkan bidang studi.

Gambar 23. menunjukkan bahwa **hanya sekitar 30,5 persen lulusan Indonesia berada di bidang STEM**, jauh di bawah rata-rata OECD yang mendekati separuh. Sebaliknya, proporsi lulusan di bidang ilmu sosial, jurnalisme, dan informasi relatif tinggi. Pola ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh preferensi individu tapi hal ini mencerminkan ketidaksinkronan insentif sistem pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan berbasis teknologi dan inovasi. Melihat berbagai tantangan tersebut pentingnya peran swasta dalam mendukung pendidikan

Gambar 24. Komposisi Lulusan: Portfolio Talenta



Sumber: OECD (2025)

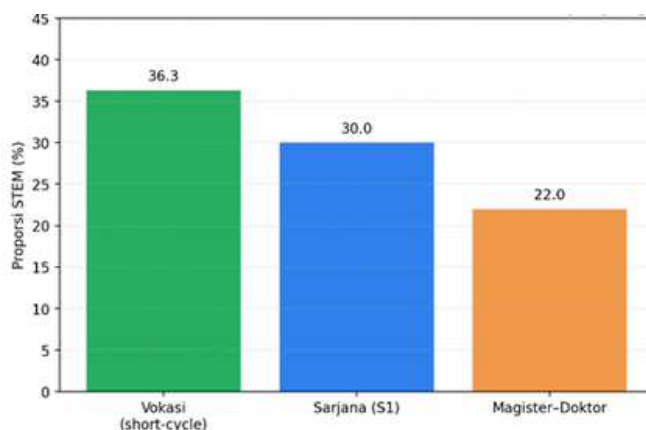
tinggi. Di Negara Singapura, **Temasek Foundation berkolaborasi dengan Pemerintah dan sektor industri dalam skema beasiswa terukur yang menempatkan lulusan pada pekerjaan prioritas dengan graduate employment alignment rate >85% di sektor teknologi & kesehatan.**

Laporan OECD dalam laporan Skills for Jobs & Skill Outlook menunjukkan bahwa negara-negara dengan infrastruktur workforce planning (mengintegrasikan sistem pendidikan, pasar kerja, dan kebutuhan industry) mengurangi skills mismatch secara signifikan, dengan forecast-error rata-rata <10% dibanding pasar tenaga kerja nyata **artinya workforce planning mampu menjaga antara jumlah lulusan yang dihasilkan dan kebutuhan nyata pasar kerja.**

Capaian ini menjadi benchmark penting bagi Indonesia untuk mencegah kelebihan lulusan, mengurangi pengangguran terdidik, dan memastikan bahwa investasi besar di pendidikan tinggi benar-benar berujung pada pekerjaan berproduktivitas tinggi.

Gambar 25 menunjukkan bahwa pada pendidikan vokasi jangka pendek, proporsi lulusan STEM justru relatif tinggi, **sementara pada jenjang sarjana hingga doktoral proporsinya menurun.** Ini mengindikasikan bahwa potensi dan minat STEM ada, **tetapi tidak tereskalasi ke tingkat pendidikan yang membentuk kepemimpinan ilmiah dan inovasi.**

Gambar 25. Paradoks Indonesia: STEM Kuat di Vokasi, Melemah di Jenjang



Sumber: OECD (2025)

Implikasi kebijakannya tegas: masalah utama Indonesia bukan bakat, melainkan arsitektur kebijakan pendidikan tinggi.

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam pengembangan talenta STEM, namun selama ini belum ditempatkan secara optimal dalam arsitektur pendidikan nasional. Proporsi STEM yang relatif tinggi pada vokasi jangka pendek menunjukkan bahwa **kapasitas dan minat teknis sebenarnya tersedia, tetapi manfaat sistem vokasi justru cenderung dinikmati oleh individu yang telah berpendidikan lebih tinggi**. Distorsi ini mengindikasikan bahwa vokasi masih berfungsi sebagai jalur sekunder, bukan sebagai jalur utama peningkatan kualitas lulusan SMA/SMK yang dirancang untuk langsung memasok tenaga kerja berkeahlian menengah–tinggi.

Dalam kerangka kebijakan, **pendidikan vokasi perlu diarahkan sebagai alternatif yang setara dengan pendidikan sarjana (*parity of esteem*) bagi lulusan SMA/SMK**, dengan standar kompetensi, sertifikasi, dan prospek pasar kerja yang sejajar. Penguatan peran vokasi pada titik ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas tenaga kerja teknis, tetapi juga mengurangi tekanan permintaan terhadap pendidikan

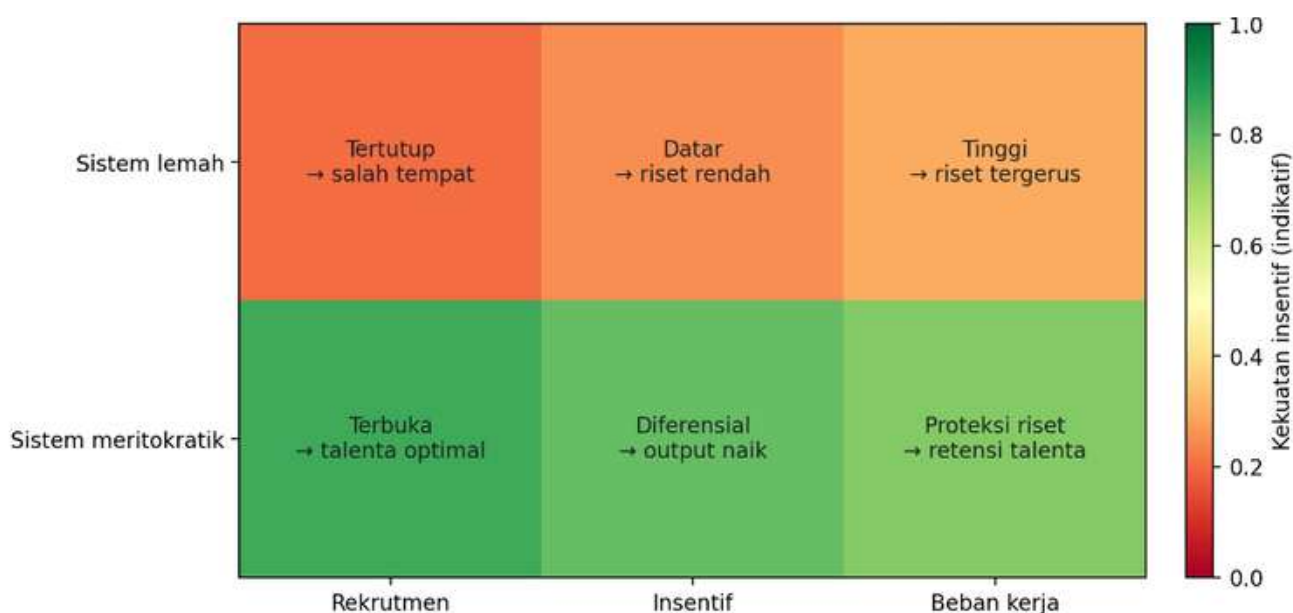
akademik, sehingga mempersempit kesenjangan rasio dosen–mahasiswa dan membebaskan universitas untuk fokus pada fungsi ilmiah yang lebih selektif, antara lain riset, pendidikan doktoral, dan inovasi strategis.

Dengan demikian, vokasi berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menata distribusi talenta nasional dan memperkuat fondasi meritokrasi dalam sistem pendidikan tinggi.

Meritokrasi yang Lemah dan Dominasi Pendekatan Sosial

Selama dua dekade terakhir, kebijakan pendidikan tinggi Indonesia menekankan perluasan akses dan afirmasi sosial, sebuah capaian penting dalam konteks keadilan. Namun dominasi pendekatan sosial yang tidak diimbangi oleh pendekatan ilmiah terbukti melemahkan meritokrasi. Rekrutmen dan promosi dosen sering kali tidak sepenuhnya berbasis kinerja riset yang terverifikasi secara internasional, sementara insentif bagi dosen unggul relatif datar.

Gambar 26. Meritokreasi Akademik: Dari Rekrutmen ke Produktivitas Ilmiah



Sumber: OCE ISEI (2025)

Distorsi Insentif dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Ekosistem pendidikan tinggi Indonesia bersifat campuran, dengan PTS menampung porsi besar mahasiswa nasional. Namun, kebijakan pendanaan dan regulasi menciptakan asimetri insentif yang tajam. Gambar 27 menunjukkan bahwa **PTN memperoleh dukungan negara yang relatif stabil, sementara PTS sangat bergantung pada pembiayaan rumah tangga dan lebih rentan terhadap perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa.**

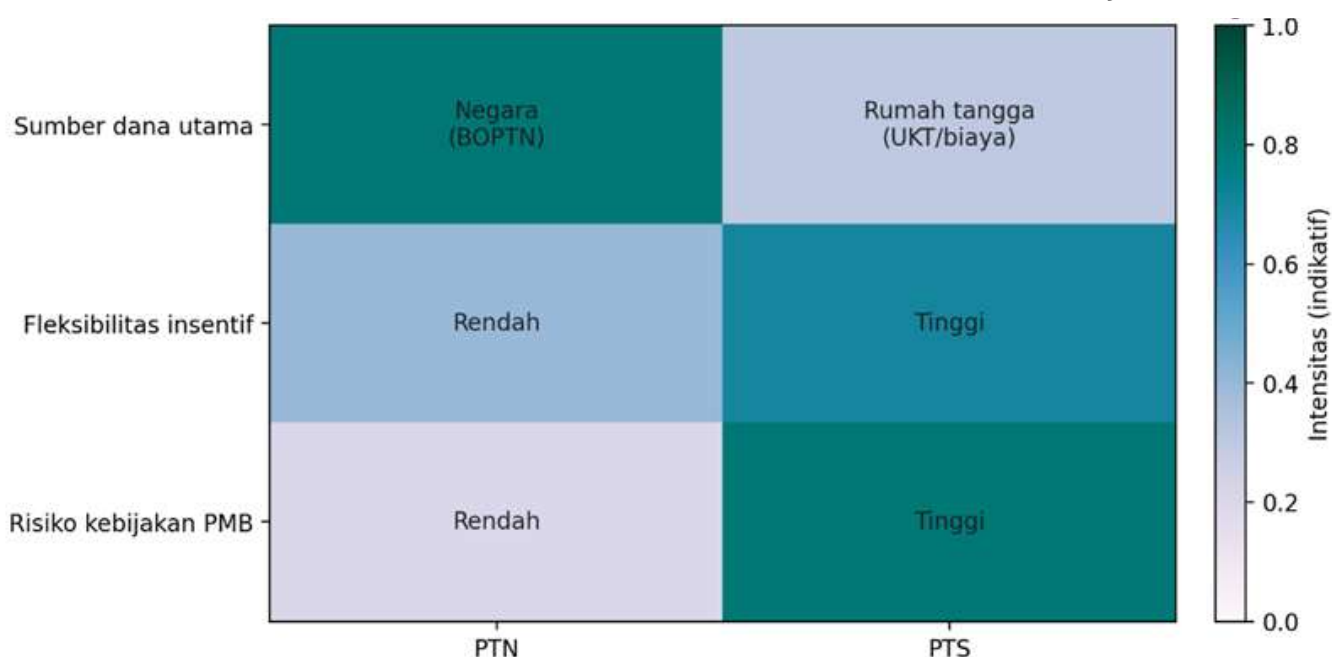
Transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuntut pergeseran dari ekspansi administratif menuju pembangunan talent ilmiah. Skema LPDP perlu dikembangkan menjadi jalur Assistant Professor Track global, yaitu mekanisme sistematis untuk menyeleksi, membiayai, dan menginkubasi peneliti muda berprestasi melalui pendidikan doctoral, post-doctoral training, serta penempatan awal sebagai dosen riset dengan standar rekrutmen, evaluasi kinerja, dan mobilitas internasional yang setara

dengan universitas kelas dunia. **Sementara universitas termasuk PTS unggulan perlu diberi akses untuk merekrut dosen internasional skema double degree dan joint supervision harus difungsikan sebagai mesin peningkatan mutu doctoral, bukan sekadar simbol internasionalisasi.**

Instrumen fiskal besar seperti LPDP dan KIP kuliah memiliki peran strategis dalam agenda ini. Dengan desain yang tepat, instrumen ini dapat berfungsi sebagai penjamin pasar talenta, mengarahkan permintaan ke bidang STEM prioritas dan universitas berkualitas, sekaligus memaksa institusi bersaing dalam mutu akademik. Seluruh agenda transformasi ini tentunya memerlukan infrastruktur institusional berupa bursa tenaga kerja ilmiah nasional. Tanpa pasar talenta yang transparan, meritokrasi akan selalu kalah oleh inersia dan kedekatan.

tetapi sebagai mesin perencanaan (*scientific workforce planning*) yang menghubungkan *pipeline* lulusan (*by field and by level*) dengan proyeksi permintaan industri dan

Gambar 27. Asimetri PTN-PTS: Skala Sistem vs Instrumen Kebijakan



Sumber: OCE (2025)

riset. Tanpa fungsi perencanaan ini, **sistem cenderung menghasilkan ketidakselarasan pendidikan dan pekerjaan (education employment mismatch) dimana jumlah lulusan tumbuh, namun absorpsi kerja berkeahlian tinggi tidak mengimbangi, sehingga muncul excess supply, underemployment, dan tekanan pada wage premium lulusan.**

Indikasi ketidaksinkronan ini terlihat dari data pasar kerja TPT 2024 untuk lulusan universitas tercatat 5,25% dan diploma 4,83% (BPS, 2025), yang menunjukkan bahwa gelar tidak otomatis berujung pada penyerapan kerja berkualitas ketika struktur permintaan belum selaras.

Bursa tenaga kerja ilmiah yang didesain sebagai *planning instrument* memungkinkan negara membangun *early-warning system* yang memetakan bidang yang mengalami *surplus/shortage*, mengkalibrasi kuota dan insentif LPDP/KIP ke bidang prioritas seperti STEM dan institusi berkinerja, serta memberi sinyal yang kredibel ke perguruan tinggi tentang kebutuhan kompetensi industri.

Karena itu, “Generasi Emas” harus diperlakukan sebagai program industrialisasi pengetahuan: proyek meritokrasi, STEM, riset, dan pasar talenta bukan sekadar proyek partisipasi kuliah. Ada empat pergeseran besar yang menentukan apakah jendela demografi menjadi akselerator atau sekadar lonjakan angkatan kerja berupah rendah:

1. Menutup kebocoran kapasitas (capacity gap) dosen dan riset

Tanpa penambahan dosen secara signifikan dan desain ulang beban kerja, rasio mahasiswa–dosen yang tinggi akan terus memaksa sistem beroperasi pada mode “mengajar massal”, bukan “membimbing riset”. Ini adalah bottleneck yang mematikan jalur doktoral, postdoc, dan regenerasi peneliti. **Solusinya bukan hanya menambah jumlah, tetapi membangun jalur karier dosen-riset yang kompetitif: rekrutmen terbuka, proteksi waktu riset, insentif berbasis output bereputasi, dan mobilitas akademik.**

2. Mengubah LPDP/KIP dari belanja sosial menjadi *talent market maker*

Instrumen fiskal besar harus bertindak seperti *capital allocator* dalam ekosistem inovasi: mengarahkan permintaan ke bidang prioritas (STEM dan frontier tech), institusi berkinerja, dan model pelatihan yang menghasilkan kapasitas ilmiah. **LPDP perlu ditingkatkan menjadi Assistant Professor Track:** seleksi ketat, pembiayaan doktoral–postdoc, penempatan awal sebagai dosen-riset, evaluasi periodik berbasis kinerja, dan koneksi kuat ke jejaring riset global.

3. Rekalibrasi Internasionalisasi sebagai Instrumen Peningkatan Mutu Doktoral dan Produktivitas Riset

Menginternasionalisasi skema double degree, joint supervision, visiting professor, dan rekrutmen dosen internasional harus didesain sebagai mesin peningkatan kualitas doktoral dan produktivitas riset—bukan sekadar label internasionalisasi.

Prinsipnya sederhana: setiap rupiah internasionalisasi harus bisa ditelusuri dampaknya ke output (publikasi bereputasi, paten, prototipe, spin-off, dan kolaborasi industri).

4. Menempatkan vokasi sebagai jalur utama (parity of esteem), bukan jalur sekunder

Data paradoks STEM yang kuat di vokasi jangka pendek tetapi melemah di jenjang lanjut menunjukkan bahwa masalahnya bukan minat, melainkan arsitektur. Vokasi harus menjadi kanal produksi teknisi dan tenaga madya berkeahlian tinggi yang langsung terserap industry mengurangi tekanan ke universitas akademik dan membebaskan universitas untuk menjadi lebih selektif dalam riset dan pendidikan doktoral. **Dengan demikian, sistem menjadi two-engine economy: vokasi menguatkan produktivitas saat ini, universitas riset membangun kapasitas inovasi masa depan.**

Namun semua desain di atas akan gagal bila meritokrasi tetap lemah karena inti persoalannya adalah misallocation of talent. Bukan sekadar portal lowongan, melainkan mesin perencanaan yang menghubungkan: pipeline lulusan (by field & level), kebutuhan industri dan riset, standar kompetensi, serta peta surplus/shortage sebagai early-warning system. Bursa ini yang akan:

- Memaksa transparansi rekrutmen dan promosi akademik;
- Mengkalibrasi kuota dan insentif LPDP/KIP ke bidang yang benar;
- Memberi sinyal kredibel ke perguruan tinggi tentang kebutuhan nyata; dan
- Pada akhirnya menurunkan mismatch, underemployment, serta tekanan pengangguran terdidik.

Kesimpulan strategisnya tegas bahwa generasi emas tidak lahir dari struktur umur, tetapi dari *rules of the game* yang menjadi kesepakatan antar stakeholders.

Jika Indonesia membangun meritokrasi yang nyata, memperbesar kapasitas dosen dan riset, mengarahkan belanja publik sebagai pengungkit STEM dan inovasi, memperlakukan internasionalisasi sebagai mesin mutu, serta menempatkan vokasi sebagai jalur utama produktivitas maka bonus demografi akan terkunci menjadi *scientific capital* nasional: tenaga kerja ilmiah yang tumbuh, inovasi yang terukur, dan daya saing yang bertahan melampaui satu dekade demografi.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan “berapa banyak yang kuliah”, melainkan **seberapa cepat bangsa ini bisa mengubah gelar menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi teknologi, dan teknologi menjadi produktivitas.** Di situlah Generasi Emas ditentukan bukan di piramida penduduk, tetapi di desain institusi dan keberanian untuk membuat meritokrasi bekerja. Meritokrasi hanya membutuhkan “political will” untuk dilaksanakan berbagai aktor terutama Pemerintah.



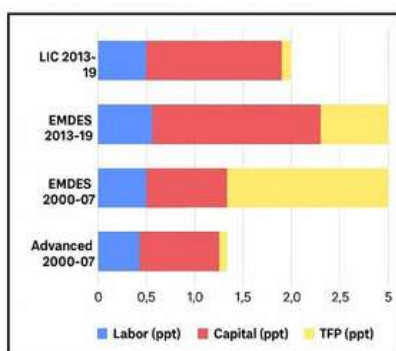
Riset Industri: Upaya *Shortcut* Membangun Bangsa

Indonesia menghadapi paradoks pembangunan yang semakin nyata, **stabilitas makroekonomi relatif terjaga dan investasi fisik terus mengalir, namun peningkatan produktivitas dan kualitas pertumbuhan bergerak lebih lambat dibanding negara-negara Asia yang kini menjadi pesaing langsung.**

Data lintas negara menunjukkan bahwa negara yang berhasil mencapai tingkat pendapatan tinggi tidak hanya mengandalkan akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi secara sistematis meningkatkan investasi riset dan pengembangan, khususnya riset industri terapan.

Negara dengan intensitas belanja R&D di atas 2–4 persen PDB menunjukkan pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat serta kemampuan upgrading industri yang lebih kuat dibandingkan negara dengan belanja R&D rendah (World Bank, 2023).

Gambar 28. Global Growth Decomposition: Pre- & Post-Global Financial Crisis



Sumber: World Bank – Global Productivity (2020-24), IMF WEO (2024)

Pasca-Global Financial Crisis (GFC), kontribusi Total Factor Productivity (TFP) terhadap pertumbuhan ekonomi global melemah

signifikan, baik di negara maju maupun berkembang. **Kondisi ini mempersempit ruang pertumbuhan berbasis input dan menjadikan inovasi serta riset terapan sebagai tantangan utama pembangunan jangka panjang.** Namun, Beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok meningkatkan belanja R&D mereka secara agresif sejak fase pendapatan menengah, dengan hasil berupa diversifikasi ekspor dan kenaikan TFP yang berkelanjutan (OECD, 2022; World Bank, 2023).

Dalam konteks ini, posisi Indonesia masih tertinggal, **Gross Expenditure on Research and Development (GERD) atau belanja R&D berada di kisaran 0,3 persen PDB pada tahun 2021–2022, jauh di bawah Vietnam yang telah mendekati 0,5 persen, serta sangat kontras dengan Korea Selatan yang melampaui 4 persen PDB (UNESCO UIS, 2023).** Masalah yang lebih krusial muncul dimana struktur pendanaan R&D Indonesia sangat bergantung pada Pemerintah, sementara kontribusi sektor swasta relatif kecil.

Dalam laporan OECD yang berjudul Science, Technology and Innovation Outlook 2021 menunjukkan bahwa komposisi pendanaan yang **didominasi Pemerintah cenderung menghasilkan riset yang kuat secara akademik tetapi lemah dalam adopsi industri**, karena minimnya market pull dan insentif komersialisasi.

Keterbatasan ini menjelaskan mengapa peningkatan **jumlah publikasi ilmiah Indonesia dalam satu dekade terakhir belum diikuti oleh lonjakan paten industri, lisensi teknologi, maupun ekspor**

manufaktur berteknologi menengah-tinggi. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), meskipun krusial sebagai anchor, secara inheren tidak dirancang untuk menanggung risiko tinggi dan kebutuhan fleksibilitas yang melekat pada riset terapan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sebuah “shortcut” institusional.

Mempercepat Lompatan Produktivitas: Peran Riset Industri Terapan dalam Transformasi Pembangunan

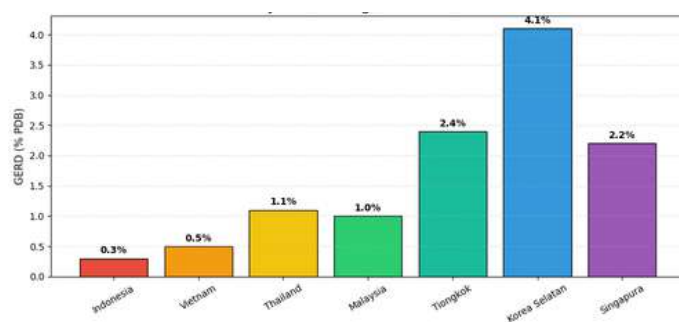
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir sebagian besar ditopang oleh ekspansi input tenaga kerja, sumber daya alam, dan investasi fisik. Sementara kontribusi produktivitas dan inovasi relatif terbatas, **pola ini lazim pada fase awal pembangunan tetapi menjadi penghambat ketika negara memasuki jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*).**

Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan terfragmentasi, ketergantungan pada keunggulan biaya semata tidak lagi memadai. **Riset industri terapan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengompresi waktu pembelajaran teknologi.** Berbeda dengan riset dasar yang berorientasi jangka panjang, riset terapan berfokus pada pemecahan masalah produksi nyata dan peningkatan proses, sehingga dampaknya terhadap produktivitas lebih cepat terasa.

Studi UNIDO terhadap negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura menunjukkan bahwa **keberadaan lembaga riset terapan yang berorientasi industri memainkan peran kunci dalam menjembatani pengetahuan**

ilmiah dan kebutuhan pasar, serta mempercepat difusi teknologi ke sektor industri domestik (UNIDO, 2021). Bagi Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena kapasitas R&D di tingkat perusahaan masih sangat terbatas: hanya 4,7% perusahaan yang melaporkan membelanjakan dana untuk R&D dalam World Bank Enterprise Surveys Indonesia 2023 relevan karena struktur industrinya didominasi oleh perusahaan yang belum memiliki kapasitas R&D internal yang kuat. Gambar 28 di atas menunjukkan kesenjangan belanja R&D ini menjelaskan mengapa Negara seperti Korea Selatan mampu mempercepat upgrading industri melalui pembelajaran teknologi yang intensif, sementara Indonesia masih mengandalkan akumulasi input. **Dengan basis R&D yang rendah, kapasitas industri untuk menyerap teknologi baru dan meningkatkan produktivitas menjadi terbatas, sehingga hilirisasi berisiko berhenti pada aktivitas bernilai tambah rendah.**

Gambar 29. Belanja R&D Beberapa Negara dalam Persentase PDB



Sumber: UNESCO (2023)

Gambar di atas menunjukkan kesenjangan belanja R&D dan menjelaskan mengapa Negara seperti Korea Selatan mampu mempercepat upgrading industri melalui pembelajaran teknologi yang intensif, sementara Indonesia masih mengandalkan akumulasi input. Dengan basis R&D yang rendah, kapasitas industri

untuk menyerap teknologi baru dan meningkatkan produktivitas menjadi terbatas, sehingga hilirisasi berisiko berhenti pada aktivitas bernilai tambah rendah.

Keterbatasan Struktural APBN dalam Mendorong Riset Terapan Berskala Industri

APBN memainkan peran sentral dalam membiayai riset dasar dan menjaga kesinambungan kapasitas ilmiah nasional. Namun, secara desain fiskal **APBN menghadapi keterbatasan struktural untuk menjadi motor utama riset terapan berskala industri**. Belanja negara harus bersaing dengan prioritas lain seperti makan bergizi gratis, pertahanan dan keamanan (hankam), perlindungan sosial, infrastruktur, dan stabilitas makro, sementara hasil R&D bersifat tidak pasti dan jangka menengah.

Keterbatasan ini menjelaskan mengapa banyak negara mengombinasikan belanja publik dengan insentif fiskal dan mekanisme mobilisasi dana swasta. **Skema matching fund, super-deduction tax untuk R&D, dan dana bersama industri digunakan untuk menurunkan risiko awal sekaligus memastikan keterlibatan langsung sektor bisnis**. Bagi Indonesia, pendekatan semacam ini menjadi krusial mengingat skala kebutuhan investasi R&D yang jauh melampaui ruang fiskal yang tersedia.

Orkestrasi Riset Terapan

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa celah terbesar dalam sistem inovasi negara berkembang terletak pada missing middle antara universitas dan industri. Institusi riset terapan seperti Fraunhofer di Jerman atau Industrial Technology

Research Institute (ITRI) di Taiwan dibentuk untuk mengisi celah ini, dengan mandat yang jelas mengembangkan teknologi siap industri dan mentransfernya ke perusahaan domestik. **Institusi semacam ini dikelola dengan tata kelola hibrida, di mana industri memiliki peran dominan dalam penentuan agenda, sementara negara menyediakan pendanaan dasar dan kerangka akuntabilitas** (OECD, 2021).

Dalam konteks Indonesia, **pembentukan lembaga riset terapan kelola bersama dapat menjadi instrumen kunci untuk mengarahkan pendanaan CSR dan swasta ke proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi terukur**. Dengan manajemen portofolio berbasis Technology Readiness Level (TRL), pendanaan dapat difokuskan pada riset near-to-market yang memiliki peluang komersialisasi tinggi, tanpa mengabaikan peran universitas dan BRIN sebagai pemasok pengetahuan dasar dan talenta peneliti.

Pembelajaran dari VinFast Vietnam

Kasus VinFast di Vietnam sering dikutip sebagai **bukti bahwa negara berkembang dapat memasuki industri berteknologi tinggi dalam waktu singkat**. VinFast memulai pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik di Hải Phòng pada 2017 dan menyelesaikan kompleks pabrik utama dalam waktu kurang dari dua tahun, dengan investasi awal sekitar USD 1,5 miliar.

Kecepatan ini dimungkinkan oleh **orkestrasi kebijakan industri yang kuat, dukungan infrastruktur dan lahan dari negara, serta pembiayaan agresif dari konglomerasi induknya**, Vingroup (ADB, 2023). Namun, keberhasilan tersebut datang dengan biaya dan risiko yang signifikan.

Hingga 2024, VinFast masih mencatat kerugian besar, dengan kerugian bersih tahunan melebihi USD3 miliar, serta ketergantungan yang tinggi pada suntikan dana berkelanjutan dari pemilik dan dukungan implisit negara. Total komitmen pendanaan yang terkait langsung dan tidak langsung dengan ekspansi VinFast diperkirakan telah mencapai lebih dari USD 15 miliar, mencerminkan tingginya risiko fiskal.

Bagi Indonesia, pelajaran utama dari VinFast **bukanlah meniru skala investasi atau model national champion yang terkonsentrasi, melainkan memahami prinsip di balik percepatan tersebut.** Kejelasan prioritas industri, penyelarasan kebijakan lintas kementerian, serta penciptaan permintaan awal (early demand) terbukti mampu mengompresi kurva pembelajaran teknologi. Namun, tanpa sistem riset terapan yang terinstitusionalisasi dan portofolio proyek yang terdiversifikasi, pendekatan semacam ini berisiko menghasilkan ketergantungan fiskal dan kegagalan tata kelola jangka panjang. Jika diagnosisnya jelas bahwa Indonesia masih bertumpu pada akumulasi

input sementara kontribusi produktivitas (TFP) melemah pasca Global Financial Crisis, maka terapinya juga harus jelas membangun institusi yang secara sistematis mengubah pengetahuan menjadi kemampuan produksi.

World Bank menegaskan bahwa **ketika ruang pertumbuhan berbasis input menyempit, technology diffusion, inovasi, dan peningkatan efisiensi menjadi penentu utama pertumbuhan jangka panjang** (World Bank, 2020). Dalam konteks Indonesia, urgensinya diperbesar oleh fakta bahwa intensitas belanja R&D kita masih rendah sekitar 0,3% PDB pada 2021–2022, jauh dari negara yang berhasil melakukan upgrading industri berbasis riset (UNESCO Institute for Statistics, 2023).

Tetapi persoalannya bukan hanya “kurang anggaran”. Ini adalah **masalah arsitektur insentif dimana struktur pendanaan R&D yang dominan publik cenderung melahirkan riset yang kuat sebagai pengetahuan, namun lemah sebagai inovasi yang dipakai industri ketika market pull tidak hadir** (OECD, 2021).



Data firm-level Indonesia menegaskan sisi hilirnya rapuh: hanya 4,7% perusahaan melaporkan belanja R&D, sehingga kemampuan menyerap teknologi baru (absorptive capacity) tidak terbentuk luas di sektor swasta (World Bank, 2023). Dengan basis seperti ini, **hilirisasi rawan berhenti pada tahap “produksi berbasis komoditas” yang bernilai tambah terbatas.**

Di sinilah makna “shortcut” institusional menjadi konkret bahwa Indonesia perlu lembaga riset industri terapan yang menjadi jembatan permanen antara kampus/BRIN dan pabrik, sekaligus menjadi mesin technology upgrading bagi perusahaan yang tidak memiliki R&D internal.

Pengalaman internasional memperlihatkan model yang terbukti: Fraunhofer mengoperasikan keseimbangan pendanaan yang mendorong kedekatan dengan kebutuhan industri sekitar 70% pendapatan riset kontrak (industri + proyek publik kompetitif) dan 30% pendanaan dasar pemerintah, sehingga institusi punya insentif kuat untuk menghasilkan solusi siap pakai sekaligus tetap memiliki ruang pre-competitive research. Di Taiwan, ITRI secara eksplisit memandatkan technology transfer dan joint research dengan perusahaan sebagai mekanisme upgrading industri domestik.

Pembelajaran VinFast Vietnam memberi dua pelajaran sekaligus: **kecepatan bisa “diciptakan”, tetapi biayanya besar dan risikonya nyata jika tidak ditopang sistem inovasi yang sehat.** Secara operasional, VinFast menunjukkan bagaimana percepatan terjadi melalui orkestrasi kebijakan dan pembiayaan agresif; namun secara finansial, beban inovasi dan ekspansi mahal. Pada sisi pembiayaan

ekosistem, iklim ADB (nonsovereign) mendukung investasi bus listrik, fasilitas manufaktur, dan infrastruktur pengisian daya dalam menggambarkan bahwa scaling teknologi tinggi sering memerlukan campuran instrumen pendanaan dan de-risking. Dengan kata lain Vietnam mempercepat lewat fokus prioritas, koordinasi lintas institusi, dan permintaan awal, namun juga menanggung konsekuensi risiko dan kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Karena itu, penutup kebijakan untuk Indonesia seharusnya tidak berhenti pada seruan “tambah anggaran R&D”, melainkan pada desain shortcut yang disiplin dan terukur:

1. Membangun “Applied Industrial Research Hub” nasional berbasis portofolio TRL

Fokus pada *near-to-market research* (mis. TRL 4–8) dengan target yang bisa diaudit: prototipe, *pilot line*, sertifikasi, paten yang dipakai, lisensi, dan peningkatan produktivitas di pabrik. Model mandat lembaga harus eksplisit menuju transfer teknologi

2. Mengubah komposisi pendanaan: dari dominan APBN menjadi co-funding yang memaksa keterlibatan industri

Menerapkan skema pendanaan berimbang yaitu pendanaan dasar (untuk kapasitas inti) + pendapatan riset kontrak dan proyek kompetitif (untuk *market discipline*), meniru logika Fraunhofer 70/30 sebagai rujukan desain insentif.

3. Menyiptakan *early demand* melalui pengadaan inovatif dan konsorsium industri

Pelajaran VinFast bukan meniru “satu juara nasional”, melainkan meniru demand creation yang mempercepat pembelajaran. Indonesia dapat memulai dari proyek lead market yang terseleksi (mis. kesehatan, pangan, energi, manufaktur hijau) dengan **pengadaan pemerintah/BUMN yang mensyaratkan local learning dan transfer teknologi bukan sekadar TKDN administratif.**

4. Mengelola risiko dengan diversifikasi, bukan konsentrasi

Model “single champion” menumpuk risiko fiskal/korporasi. Indonesia sebaiknya memakai portofolio multi-proyek multi-aktor (perusahaan besar + menengah + startup + kampus) agar **inovasi menjadi mesin kolektif, bukan taruhan tunggal terutama ketika bukti menunjukkan**

kerugian dan kebutuhan pendanaan bisa membesar pada fase ekspansi. Pada akhirnya, shortcut membangun bangsa bukan jalan pintas tanpa biaya, melainkan cara memperpendek waktu belajar teknologi melalui institusi yang tepat.

Indonesia tidak kekurangan talenta dan tidak kekurangan kebutuhan industri; yang selama ini kurang adalah jembatan yang membuat keduanya bertemu dalam satu logika yang sama yaitu logika produktivitas. Jika jembatan itu dibangun dengan tata kelola yang jelas seperti pembiayaan Pemerintah-swasta, dan target TRL yang jelas, maka riset industri terapan dapat menjadi mesin pengungkit yang selama ini hilang, mengubah pertumbuhan dari “bertambah besar” menjadi “bertambah canggih”.



Sociopreneurship Berbasis Potensi Lokal

Ekonomi global memasuki fase pertumbuhan rendah dengan ketidakpastian struktural yang tinggi. Ekonomi global memasuki fase pertumbuhan rendah yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian struktural. Menurut OECD (2025), pada tahun 2026 **laju pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tetap berada di bawah tren historisnya, terutama dipengaruhi oleh fragmentasi geoekonomi yang semakin mendalam, perlambatan produktivitas, serta disrupsi berkelanjutan pada pasar tenaga kerja.** Dalam konteks tersebut, prospek perekonomian Indonesia dinilai relatif lebih stabil meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari tekanan eksternal.

IMF (2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar sekitar 4,9 persen, dengan tingkat inflasi tahunan berada pada kisaran 1,8 persen, mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga. Sejalan dengan itu, World Bank (2025) melalui laporan Indonesia Economic Prospects memproyeksikan **pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di sekitar 5 persen hingga 2026–2027, dengan dukungan utama berasal dari investasi swasta dan kinerja ekspor neto.**

Dari sisi kebijakan domestik, Pemerintah Indonesia dalam pembahasan asumsi makro RAPBN 2026 bersama DPR menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen sebagai baseline kebijakan fiskal, dengan inflasi ditargetkan sebesar 2,5 persen dan nilai tukar diasumsikan berada pada kisaran Rp16.500–16.900 per dolar AS (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Selain itu, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 605–620 ribu barel per hari serta lifting gas sebesar 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional.

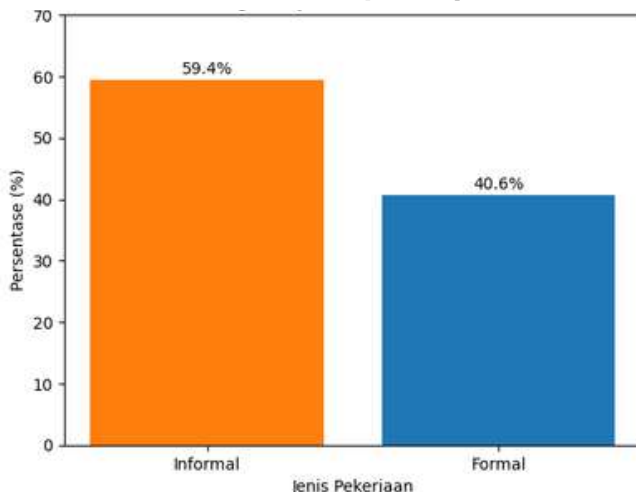
Sementara itu, Bank Indonesia dalam asesmen makroekonominya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada pada kisaran sekitar 5,33 persen, dengan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,6 persen, serta nilai tukar rupiah rata-rata berada di sekitar Rp16.430 per dolar AS. Bank Indonesia menekankan bahwa realisasi pertumbuhan tersebut sangat ditentukan oleh stabilitas makroekonomi domestik dan efektivitas bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dalam merespons risiko global yang masih tinggi (Bank Indonesia, 2025).

Dalam konteks tersebut, **Indonesia tampak relatif stabil di angka 5 persen sering dipandang sebagai pencapaian makro ekonomi yang solid.** Namun, stabilitas ini menyembunyikan persoalan yang lebih mendasar, yaitu menurunnya kualitas pertumbuhan. **Pertumbuhan yang tidak diiringi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah, berisiko menciptakan ilusi kemajuan ekonomi yang rapuh dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.**

Di sinilah Indonesia berada pada sebuah persimpangan strategis, apakah akan melanjutkan model pertumbuhan yang bertumpu pada ekspansi aktivitas ekonomi berproduktivitas rendah, atau beralih ke

strategi yang secara sadar menempatkan produktivitas dan transformasi struktural sebagai tujuan utama pembangunan.

Gambar 30. Struktur Ketenagakerjaan Indonesia (2025)



Sumber: BPS Februari (2025)

Gambar 30 menunjukkan bahwa sekitar **59,4 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, sementara hanya sekitar 40,6 persen yang berada di sektor formal**. Struktur ini mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja tidak berada dalam sistem produksi yang memiliki standar pengupahan, pelatihan berkelanjutan, serta jalur peningkatan produktivitas yang jelas.

Tingginya informalitas ini bukan sekadar persoalan status hukum tenaga kerja, melainkan **mencerminkan struktur ekonomi yang didominasi aktivitas subsisten, dengan produktivitas, perlindungan, dan peluang peningkatan pendapatan yang terbatas**. Kondisi ini mencerminkan Baumol's cost disease, di mana sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor-sektor dengan pertumbuhan produktivitas yang lambat.

Akibatnya, penambahan tenaga kerja tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan output kapita per pekerja. Indonesia bukan

kekurangan lapangan kerja, melainkan kekurangan pekerjaan produktif. Setiap tahun, ekonomi menyerap tenaga kerja baru, tetapi sebagian besar masuk ke sektor dengan produktivitas rendah dan pendapatan stagnan.

Tekanan produktivitas ini diperburuk oleh ketidakpastian kebijakan dan regulasi yang meningkatkan sikap wait-and-see pelaku usaha dan rumah tangga kelas menengah-atas. OECD Economic Outlook 2025 mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan domestik dapat menahan konsumsi dan investasi swasta, sehingga transmisi pertumbuhan ke penciptaan kerja riil menjadi lebih lemah. Selain itu, penilaian iklim investasi juga menekankan bahwa **ketidakpastian regulasi dan kompleksitas perizinan masih menjadi hambatan bagi investor**, yang pada akhirnya menunda ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja.

Sociopreneurship Berbasis Potensi Lokal sebagai Instrumen Transformasi Produktivitas

Sociopreneurship berbasis potensi lokal menawarkan jalan tengah antara logika pasar dan tujuan pembangunan sosial (ESG). Berbeda dari kewirausahaan konvensional, pendekatan ini tidak hanya menekankan keberlanjutan finansial, tetapi juga secara eksplisit **menargetkan dampak sosial dan transformasi struktural ekonomi lokal**. Dalam kerangka ini, *sociopreneurship* dipahami sebagai model usaha yang:

1. Berakar pada potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, ekonomi hijau),
2. Mengorganisasi produsen kecil dalam skema kolektif atau kluster (koperasi),

3. Menerapkan standar kualitas, tata kelola, dan inovasi proses,
4. Menghubungkan komunitas lokal dengan pasar bernilai tambah lebih tinggi.

Pendekatan ini relevan bagi Indonesia karena mayoritas tenaga kerja berada di sektor-sektor berbasis sumber daya lokal. Dengan mengubah cara sektor-sektor ini beroperasi bukan dengan menggantikannya, **Indonesia dapat mendorong transformasi produktivitas yang inklusif**. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dapat memperkuat jalur integrasi tersebut, karena ia dirancang sebagai kendaraan kelembagaan yang mengonsolidasikan potensi ekonomi lokal melalui modal kolektif, sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih tertib dan akuntabel.

Instruksi Presiden Inpres No. 9 Tahun 2025 menekankan percepatan pembentukan Koperasi desa Merah Putih melalui langkah yang terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi, serta mendorong pelaksanaan yang terukur, akuntabel, dan efisien, termasuk penguatan pemantauan-evaluasi serta integrasi data lintas K/L dan pemda.

Dalam rangka mendorong percepatan pembentukan kelembagaan Koperasi Merah Putih dan memastikan pelaksanaan prinsip ESG dan GRC maka ISEI mendorong tiga terobosan dalam mempercepat kelembagaan ini untuk mendorong sociopreneurship: 1) **Bagi desa/kelurahan yang sudah memiliki Koperasi** dapat dilakukan rebranding menjadi Koperasi Merah Putih dimana laporan keuangan bagi Koperasi tersebut dapat menjadi dasar perbankan untuk memberikan injeksi dana;

2) **Bagi desa/kelurahan yang tidak memiliki koperasi namun memiliki Badan Usaha Milik Desa (BumDes)**, dengan menggunakan dana desa dan laporan keuangan dapat menjadi dasar perbankan untuk melakukan injeksi dana; dan 3) **Bagi desa/kelurahan yang tidak memiliki Koperasi dan BumDes**, dana desa dapat digunakan sebagai persyaratan bagi perbankan melakukan injeksi dana. Dengan strategi ini, kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan dana sebesar Rp2-3 Miliar dapat dilakukan dengan menerapkan praktik GRC dan 5C.

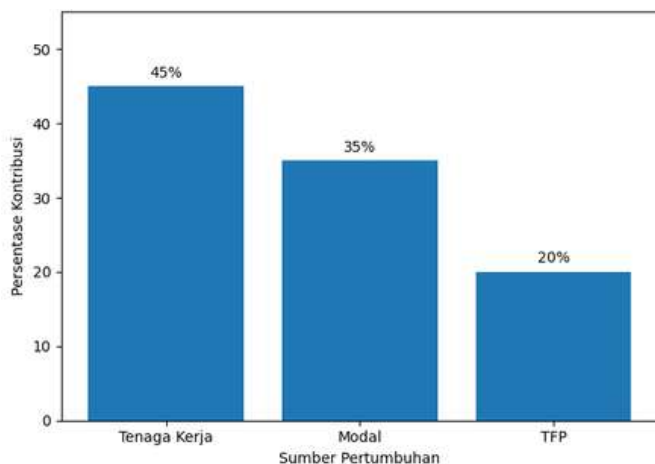
Dengan menggunakan **expertise perbankan dalam melakukan manajemen risiko, tata kelola koperasi yang lebih transparan dan berbasis pengawasan dengan semangat kolektif dapat dilakukan**. Pemerintah juga dapat memastikan kembalinya “soko guru perekonomian” nasional yang telah lama mati suri. Secara sosial-ekonomi, **koperasi berfungsi sebagai perangkat kelembagaan yang membentuk *collective incentive structure***, di mana kepemilikan bersama dan pengambilan keputusan kolektif memperkuat mekanisme koordinasi, disiplin internal, serta akumulasi reputasi bersama.

Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap standar, tata kelola, dan praktik berkelanjutan menjadi rasional secara ekonomi, karena kegagalan individu berimplikasi langsung pada kinerja dan kredibilitas kolektif. **Produktivitas dan Total Factor Productivity TFP sebagai tujuan utama**.

Dari sudut pandang ekonomi makro, tujuan akhir dari pengembangan sociopreneurship bukan semata peningkatan pendapatan individu, melainkan peningkatan TFP. Indikator TFP mencerminkan efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi dan

sering dianggap sebagai indikator kualitas pertumbuhan ekonomi.

Gambar 31. Kondisi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: APO Productivity Databook (2024)

Berdasarkan data Asian Productivity Organization (2024), menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah mereka yang mampu meningkatkan TFP melalui inovasi organisasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan integrasi ke rantai nilai global. Sociopreneurship berbasis klaster memungkinkan proses ini terjadi di sektor-sektor tradisional yang selama ini terabaikan oleh kebijakan industrialisasi konvensional.

Implikasi Kebijakan: Dari Intervensi Parsial ke Desain Transformasi Struktural

Pendekatan sociopreneurship menuntut perubahan paradigma kebijakan. Fokus tidak lagi pada jumlah usaha yang dibentuk, tetapi pada kapasitas usaha untuk tumbuh, terintegrasi, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini mensyaratkan:

- Pembiayaan berbasis kinerja, bukan sekadar akses kredit,
- Pelatihan yang melekat pada kebutuhan pasar dan rantai nilai,

- Kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai aggregator dan off taker, bukan sekadar fasilitator.

Menurut World Economic Forum (2025), masa depan pekerjaan akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara mengelola transisi keterampilan. Sociopreneurship dapat menjadi **wahana konkret untuk skilling, upskilling dan, reskilling tenaga kerja informal ke dalam aktivitas ekonomi yang lebih produktif** yang diwadahi oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam dunia yang ditandai oleh perlambatan global dan kompetisi yang semakin ketat, masa depan pertumbuhan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya **mengubah potensi lokal menjadi sumber produktivitas nasional**. Sociopreneurship berbasis potensi lokal bukan sekadar pendekatan sosial atau alternatif kebijakan, melainkan sebuah strategi transformasi ekonomi yang menjembatani stabilitas makroekonomi dengan kesejahteraan mikro yang berkelanjutan.

Jika sociopreneurship diposisikan sebagai instrumen transformasi produktivitas, **maka kebijakan publik perlu bergeser dari logika program (jumlah pelatihan, jumlah UMKM, jumlah kredit) menuju logika arsitektur (institusi, insentif, dan mekanisme eksekusi)**. Di sinilah relevansi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi strategis: bukan semata sebagai entitas administratif, melainkan sebagai platform kelembagaan untuk **agregasi produksi, standardisasi, dan integrasi rantai nilai**. Instruksi Presiden Inpres No. 9 Tahun 2025 secara eksplisit mengarahkan percepatan pembentukan melalui langkah yang

terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi, termasuk pemantauan–evaluasi dan penguatan manajemen (termasuk basis digital) untuk mendukung pembentukan hingga 80.000 koperasi.

Dalam kerangka ini, koperasi berperan sebagai institutional enabler yang mengatasi kegagalan koordinasi di sektor tradisional: (i) skala ekonomi kecil, (ii) kualitas produksi tidak seragam, (iii) posisi tawar lemah terhadap pembeli besar, dan (iv) keterputusan dari pembiayaan formal. Ketika produksi teragregasi dan standar dapat ditegakkan secara kolektif, maka transformasi produktivitas tidak lagi bergantung pada “hero entrepreneur”, tetapi pada rekayasa kelembagaan yang membuat produktivitas menjadi hasil yang sistemik.

Tiga Pilar Intervensi: Pasar, Kapabilitas, dan Tata Kelola

Agar sociopreneurship benar-benar menaikkan produktivitas (bukan sekadar menambah aktivitas), desain intervensi perlu ditambatkan pada tiga pilar berikut.

1) Pilar Pasar: Kepastian Permintaan sebagai “Mesin Skala”

Masalah terbesar UMKM subsisten bukan sekadar modal, melainkan ketidakpastian permintaan. Karena itu, kebijakan yang paling “produktif” biasanya adalah kebijakan yang menciptakan *market discipline* melalui:

- Kontrak offtaker (B2B, rantai pasok industri, maupun pengadaan publik) berbasis standar mutu.
- Skema agregasi (koperasi/aggregator) yang menegosiasikan harga & volume

- Akses pasar bernilai tambah melalui kurasi produk, sertifikasi, dan traceability.

Di titik ini, **prinsip ESG menjadi relevan bukan sebagai slogan, tetapi sebagai bahasa standar pasar**: semakin kuat standar proses, ketertelusuran, dan kepatuhan, semakin tinggi peluang masuk rantai nilai formal.

2) Pilar Kapabilitas: Triple Skilling yang “melekat” pada rantai nilai

Pelatihan yang tidak terhubung dengan permintaan pasar cenderung menjadi *low-return training*. **Triple skilling (skilling–upskilling–reskilling) harus dirancang melekat pada kebutuhan klaster: kualitas, produktivitas proses, manajemen stok, digitalisasi transaksi, hingga kepatuhan standar.**

Berdasarkan laporan *Future of Jobs Report 2025* menekankan dinamika pergeseran keterampilan yang cepat hingga 2030, sehingga jalur peningkatan keterampilan perlu berkelanjutan dan adaptif. Dengan kata lain, **pelatihan tidak lagi dihitung dari jumlah sertifikat, melainkan dari perubahan metrik kinerja usaha (yield, defect rate, lead time, repeat order, dan produktivitas per pekerja).**

3) Pilar Tata Kelola: GRC sebagai productivity infrastructure

Dalam ekonomi kelembagaan, **produktivitas naik ketika biaya transaksi turun dan kepastian kontrak meningkat.** Koperasi dapat menjadi kendaraan GRC (Governance, Risk, Compliance) karena ia membentuk collective incentive structure: reputasi, kepatuhan, dan kualitas

diperlakukan sebagai aset bersama, sehingga kegagalan individu berkonsekuensi pada kinerja kolektif. Inpres 9/2025 juga menekankan tata laksana yang akuntabel, terukur, serta penguatan pemantauan–evaluasi dan pengelolaan berbasis data/digital komponen yang selaras dengan logika GRC.

Ketika **mekanisme tata kelola seperti ini terinstitusionalisasi secara luas, dampaknya tidak berhenti pada efisiensi usaha individual, melainkan terakumulasi menjadi peningkatan produktivitas agregat yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi nasional.**

Dalam lanskap global yang ditandai pertumbuhan rendah dan ketidakpastian, stabilitas pertumbuhan Indonesia di kisaran 5 persen perlu dibaca secara kritis: **tantangan utamanya bukan mempertahankan aktivitas ekonomi, melainkan menaikkan produktivitas dan kualitas pertumbuhan.** Proyeksi pertumbuhan 2026 dari berbagai otoritas menunjukkan ruang pertumbuhan masih ada, namun realisasinya sangat bergantung pada stabilitas makro dan efektivitas

bauran kebijakan dalam merespons risiko global. Agenda produktivitas tidak dapat menunggu industrialisasi skala besar semata. **Sociopreneurship berbasis potensi lokal menawarkan jalur transformasi yang lebih realistis: memperbaiki organisasi produksi, memperkuat standar, menurunkan biaya transaksi, dan menghubungkan tenaga kerja informal ke aktivitas bernilai tambah lebih tinggi.**

Dalam kerangka tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berfungsi sebagai platform kelembagaan yang menjembatani potensi lokal dengan disiplin pasar serta penerapan ESG dan GRC, sehingga produktivitas tidak tumbuh secara sporadis, melainkan menjadi hasil yang terinstitusionalisasi.

Dengan kata lain, **strategi pertumbuhan Indonesia ke depan perlu bergeser dari ekspansi kuantitatif menuju pendalaman kualitas: dari banyaknya unit usaha menuju naiknya produktivitas per pekerja; dari program jangka pendek menuju arsitektur transformasi; dan dari retorika kewirausahaan menuju mesin produktivitas yang terukur dan berkelanjutan.**



Daftar Pustaka

- [1] Asian Development Bank. (2023). Vietnam: Electric vehicle industry development and policy support. Asian Development Bank.
- [2] Asian Development Bank. (2023). Asia SME monitor database. Asian Development Bank.
- [3] Bank Indonesia. (2025). Asesmen makroekonomi Indonesia 2025–2026. Bank Indonesia.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2023–2025). Berbagai publikasi statistik ekonomi dan sosial Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- [5] Bappenas RI. (2025). Data dan proyeksi pembangunan nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- [6] CEIC Data Company Ltd. (2025). CEIC database: Indonesia macroeconomic indicators.
- [7] Google, Temasek, & Bain & Company. (2025). e-Conomy SEA 2025.
- [8] International Monetary Fund. (2024). World economic outlook. IMF.
- [9] International Monetary Fund. (2025). World economic outlook update. IMF.
- [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Asumsi makro RAPBN 2026. Kementerian Keuangan RI.
- [11] Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Data UMKM Indonesia. KemenKop UKM.
- [12] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Statistik pendidikan tinggi Indonesia. Kemdiktisaintek.
- [13] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Science, technology and innovation outlook. OECD Publishing.
- [14] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Innovation and productivity growth. OECD Publishing.
- [15] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Economic outlook and global value chain statistics. OECD Publishing.
- [16] Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture. (2025). Inclusive closed loop model for agricultural commodities.
- [17] UNESCO Institute for Statistics. (2023). Global R&D expenditure database. UNESCO.
- [18] United Nations Industrial Development Organization. (2021). Industrial development report. UNIDO.
- [19] United States Department of Agriculture. (2025). Baseline agricultural projections. USDA.
- [20] World Bank. (2019). Aspiring Indonesia: Expanding the middle class. World Bank.
- [21] World Bank. (2020–2025). Global productivity and Indonesia economic prospects. World Bank.
- [21] World Economic Forum. (2023). The future of jobs report. WEF.



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No. 9, Jakarta 12110

Telp : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

E-mail : isei.pusat@gmail.com

 [ppisei_official](https://www.instagram.com/ppisei_official)

 [PP ISEI](https://www.youtube.com/PPISEI)

 isei.or.id